

2024

Laporan Tahunan

An aerial photograph of a dense green forest. In the center, there is a clearing that is shaped like the number "02". The clearing shows a blue sky with white clouds. The number "02" is formed by a path or a clearing within the forest, with the "0" being a large loop and the "2" being a straight line extending from the loop.

02

Analisis Praktik Pengungkapan
**Lingkungan, Sosial, dan Tata
Kelola (LST)** Perusahaan
Nasional Periode 2023



DAFTAR ISI



4	Kata Pengantar	
6	Ringkasan Eksekutif	
18	Tujuan	
20	Metodologi	
24	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Laporan Keberlanjutan dari Periode Tahun Fiskal	
28	Hasil dan Analisa Pengungkapan 33 Faktor LST Emiten	
48	Indeks ESG BGK Foundation	
54	Rekomendasi	
60	Penutup	



KATA PENGANTAR



Deni Daruri

Founder BGK Foundation

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kami, BGK Foundation dapat menyelesaikan laporan tahunan: Analisa Praktik Pengungkapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) Perusahaan Nasional Periode 2023.

BGK Foundation adalah organisasi independen yang aktif mendukung inisiatif terkait keberlanjutan. Sebagai anggota dari *Global Reporting Initiative (GRI)*, *supporting member* dari *Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)*, dan *accredited solution provider silver* dari *Carbon Disclosure Project (CDP)*, BGK Foundation telah melakukan berbagai analisa dan riset terkait sustainability, serta analisa dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola dari kegiatan perusahaan yang bertujuan untuk kemajuan berbagai sektor industri di Indonesia.

Isu terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) telah menjadi topik strategis yang sangat relevan dan dipandang sebagai “*legacy*” baru bagi perusahaan modern. Peningkatan perhatian terhadap LST mencerminkan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melihat perusahaan tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Oleh karena itu, BGK Foundation berkomitmen untuk mendorong perusahaan agar lebih transparan dalam mengungkapkan aspek LST. Melalui panduan yang sesuai dengan regulasi nasional dan internasional, BGK Foundation membantu perusahaan memadukan praktik keberlanjutan dengan kepatuhan hukum, membangun reputasi yang lebih baik, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk komitmen dalam meneruskan riset dan analisa terkait pengungkapan LST di Indonesia, BGK Foundation secara konsisten menerbitkan laporan tahunan yang merangkum hasil riset dan analisis terkait pengungkapan LST. Tren positif menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang mulai menyadari pentingnya menyusun laporan keberlanjutan. Hal ini membuat BGK Foundation semakin optimis bahwa tingkat pengungkapan LST di Indonesia akan terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

Selain itu, komitmen pemerintah Indonesia dalam *Conference of the Parties (COP 26)* dan *Nationally Determined Contribution (NDC)* yang menargetkan penurunan emisi nasional sebesar 29% secara mandiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai sektor industri. Dengan menghitung dan mengungkapkan emisi yang dihasilkan pada laporan keberlanjutan, tidak hanya menjadi kontribusi nyata bagi upaya pemerintah dalam mengurangi emisi, tetapi juga memperkuat nilai perusahaan melalui transparansi pengungkapan LST yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang terukur, akurat, kredibel, dan objektif.

Akhir kata, semoga dengan adanya analisa praktik pengungkapan LST perusahaan nasional periode 2023, dapat memberikan evaluasi sekaligus menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi dalam menyusun laporan keberlanjutan. Dengan meningkatnya transparansi, akan sejalan dengan peningkatan kinerja LST perusahaan yang turut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja LST secara nasional.

A hand is shown from the bottom, cupping a small green plant seedling. The seedling has two large, heart-shaped leaves and a small stem with two buds. The background is a soft-focus image of green trees. A green rectangular overlay is positioned in the top left corner, and a larger green rectangular overlay with rounded corners is positioned in the lower half of the image, containing the text.

RINGKASAN EKSEKUTIF

BGK Foundation telah menyelesaikan evaluasi mendalam atas pengungkapan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam laporan keberlanjutan perusahaan nasional. Evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada pedoman 33 Faktor Materialitas LST yang dikembangkan oleh BGK Foundation, memastikan bahwa setiap aspek material yang relevan dengan keberlanjutan perusahaan dapat diidentifikasi dan dianalisis secara komprehensif.

Dalam melakukan evaluasi pengungkapan LST, BGK Foundation menganalisa laporan keberlanjutan untuk tahun finansial yang berakhir pada 31 Desember 2023. Laporan-laporan tersebut diterbitkan oleh 150 perusahaan yang diambil berdasarkan publikasi laporan keberlanjutan dari *website official* masing-masing. Periode penerbitan laporan keberlanjutan yang masuk dalam kriteria penilaian adalah laporan yang terbit antara bulan Januari – Oktober 2024.

Adapun 150 perusahaan yang dilakukan penilaian terdiri dari 122 emiten (33 emiten LQ45) dan 28 perusahaan non-emiten dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	ESG Disclosure (%)	Keterangan
1	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	96	LQ45
2	ABMM	PT ABM Investama Tbk	95	
3	PTBA	PT Bukit Asam Tbk	95	LQ45
4	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	94	LQ45
5	TINS	PT Timah Tbk	91	
6	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	91	LQ45
7	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	89	LQ45
8	POWR	PT Cikarang Listrindo Tbk	89	
9	BJBR	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	88	
10	INCO	PT Vale Indonesia Tbk	88	
11	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	87	LQ45
12	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	83	LQ45
13	PGEO	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	81	LQ45
14	BUMI	PT Bumi Resources Tbk	80	
15	INDY	PT Indika Energy Tbk	79	
16	ANJT	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	79	
17	DOID	PT Delta Dunia Makmur Tbk	79	
18	BTPN	PT Bank BTPN Tbk	77	
19	ASII	PT Astra International Tbk	77	LQ45
20	MBMA	PT Merdeka Battery Materials Tbk	76	LQ45
21	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	76	LQ45
22	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk	75	

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	ESG Disclosure (%)	Keterangan
23	WEGE	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	75	
24	MEDC	PT Medco Energi Internasional Tbk	75	LQ45
25	DSNG	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	75	
26	MDKA	PT Merdeka Copper Gold Tbk	74	
27	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	73	
28	PTRO	PT Petrosea Tbk	71	
29	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	70	LQ45
30	DEWA	PT Darma Henwa Tbk	69	
31	TOWR	PT Sarana Menara Nusantara Tbk	67	LQ45
32	BRMS	PT Bumi Resources Minerals Tbk	67	
33	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	66	LQ45
34	EMTK	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	66	
35	JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	65	LQ45
36	BNGA	PT Bank CIMB Niaga Tbk	64	
37	SIDO	PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	64	LQ45
38	BJTM	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	63	
39	GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	63	
40	CITA	PT Cita Mineral Investindo Tbk	62	
41	NCKL	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	58	
42	DSSA	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	56	
43	BRIS	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	54	LQ45
44	BANK	PT Bank Aladin Syariah Tbk	54	
45	BDMN	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	53	
46	BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	50	LQ45
47	TBIG	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	50	
48	TPIA	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	42	
49	ELSA	PT Elnusa Tbk	39	
50	SSMS	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	39	
51	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	39	LQ45
52	ADMR	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	38	LQ45
53	TOBA	PT TBS Energi Utama Tbk	38	
54	ADRO	PT Adaro Energy Indonesia Tbk	37	LQ45
55	ISAT	PT Indosat Tbk	37	LQ45
56	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk	37	LQ45
57	GOTO	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	37	LQ45

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	ESG Disclosure (%)	Keterangan
58	SMCB	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	36	
59	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	35	
60	BIRD	PT Blue Bird Tbk	35	
61	STAA	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	35	
62	JAWA	PT Jaya Agra Wattie Tbk	35	
63	PPRO	PT PP Properti Tbk	35	
64	EXCL	PT XL Axiata Tbk	34	LQ45
65	BNII	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	34	
66	PSGO	PT Palma Serasih Tbk	34	
67	PTPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	34	
68	LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk	33	
69	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk	33	
70	TAPG	PT Triputra Agro Persada Tbk	33	
71	SMRA	PT Summarecon Agung Tbk	32	LQ45
72	INPC	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	32	
73	INTP	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	32	LQ45
74	INPP	PT Indonesian Paradise Property Tbk	31	
75	CRSN	PT Carsurin Tbk	31	
76	ARCI	PT Archi Indonesia Tbk	31	
77	NISP	PT Bank OCBC NISP Tbk	31	
78	JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	30	
79	SCMA	PT Surya Citra Media Tbk	30	
80	HRUM	PT Harum Energy Tbk	30	
81	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	30	
82	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk	30	
83	LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk	29	
84	META	PT Nusantara Infrastructure Tbk	29	
85	AMRT	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	29	LQ45
86	MERK	PT Merck Tbk	28	
87	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	28	LQ45
88	IPCM	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	28	
89	SRTG	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	28	
90	KAEF	PT Kimia Farma Tbk	27	
91	HERO	PT Hero Supermarket Tbk	27	
92	TOTL	PT Total Bangun Persada Tbk	27	

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	ESG Disclosure (%)	Keterangan
93	MEGA	PT Bank Mega Tbk	26	
94	ASGR	PT Astra Graphia Tbk	25	
95	BTPS	PT Bank BTPN Syariah Tbk	25	
96	PJAA	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	25	
97	TLKM	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	23	
98	MYOR	PT Mayora Indah Tbk	23	
99	AGII	PT Samator Indo Gas Tbk D/H PT Aneka Gas Tbk	22	
100	AGRO	PT Bank Raya Indonesia Tbk	22	
101	UNTR	PT United Tractors Tbk	22	
102	IPCC	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	21	
103	LPLI	PT Star Pasific Tbk	21	
104	ACES	PT Ace Hardware Indonesia Tbk	20	LQ45
105	PNBN	PT Bank Pan Indonesia Tbk	20	
106	ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	20	
107	COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	19	
108	PSSI	PT IMC Pelita Logistik Tbk	19	
109	IBST	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	18	
110	ADMF	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	18	
111	MAYA	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	18	
112	CSRA	PT Cisadane Sawit Raya Tbk	16	
113	WSKT	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	15	
114	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	15	LQ45
115	BNLI	PT Bank Permata Tbk	15	
116	BRPT	PT Barito Pacific Tbk	15	LQ45
117	HMSP	PT HM Sampoerna Tbk	14	
118	KEEN	PT Kencana Energi Lestari Tbk	13	
119	BBMD	PT Bank Mestika Dharma Tbk	10	
120	ADES	PT Akasha Wira International Tbk	9	
121	INAF	PT Indofarma Tbk	9	
122	BEKS	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	9	
123	Private Company	PT Pupuk Kalimantan Timur	95	
124	Private Company	PT Pertamina (Persero)	95	
125	Private Company	PT Pupuk Indonesia (Persero)	93	
126	Private Company	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	91	
127	Private Company	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	88	

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	ESG Disclosure (%)	Keterangan
128	Private Company	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	86	
129	Private Company	PT Kilang Pertamina Internasional	84	
130	Private Company	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	82	
131	Private Company	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	81	
132	Private Company	PT PLN Nusantara Power	79	
133	Private Company	PT Angkasa Pura I (Persero)	78	
134	Private Company	PT PLN Indonesia Power	76	
135	Private Company	PT Tripatra	68	
136	Private Company	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	51	
137	Private Company	PT Mitra Maju Sukses (MMS) Group Indonesia	43	
138	Private Company	PT Federal International Finance	33	
139	Private Company	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)	32	
140	Private Company	PT Sinar Mas Land	32	
141	Private Company	PT Perum Peruri (Persero)	28	
142	Private Company	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	26	
143	Private Company	PT Pegadaian (Persero)	25	
144	Private Company	PT Prudential Life Assurance	24	
145	Private Company	PT Bank DKI	20	
146	Private Company	PT Mandiri Capital Indonesia	19	
147	Private Company	PT Permodalan Nasional Madani	18	
148	Private Company	PT Bank Aceh Syariah	18	
149	Private Company	PT Asuransi Jasa Indonesia	16	
150	Private Company	PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero)	12	

Evaluasi dan penilaian pengungkapan LST setiap perusahaan berfokus pada faktor-faktor sebagai berikut:

- Apakah perusahaan telah menerbitkan laporan keberlanjutan;
- Kapan laporan keberlanjutan diterbitkan;
- Apakah laporan keberlanjutan telah melalui proses *assurance* oleh pihak ketiga independen (AA1000 atau ISAE3000);
- Pengungkapan dari perusahaan berdasarkan penilaian 33 faktor LST;
- Bagaimana perusahaan mempersiapkan laporan keberlanjutan dan seberapa detail informasi yang diungkapkan dalam laporan, serta kesesuaian laporan dengan standar *Global Reporting Initiative* (GRI).

Komponen penilaian atas pengungkapan topik lingkungan, sosial, dan tata kelola pada laporan keberlanjutan mencakup:



Lingkungan

- Emisi GRK (E1)
- Intensitas GRK (E2)
- Konsumsi energi (E3)
- Intensitas energi (E4)
- Energi *mix* (E5)
- Konsumsi air (E6)
- Peraturan, Prosedur dan Proses (PPP) mengenai lingkungan (E7)
- Pengawasan Dewan Direksi lingkungan (E8)
- Pengawasan manajemen senior lingkungan (E9)
- Pengelolaan dan analisa investasi kepada iklim dan lingkungan (E10)
- Tanggung jawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Perhutanan (E11)



GRI Utama : **20** GRI Indikator : **76** GRI Sub Indikator : **33**



SOSIAL

- Perbandingan gaji CEO (S1)
- Perbandingan gaji antar *gender* (S2)
- Persentase pergantian karyawan (S3)
- Persentase keberagaman *gender* (S4)
- Persentase pekerja sementara (S5)
- PPP non-diskriminasi (S6)
- Angka cedera/kecelakaan (S7)
- Tingkat kesehatan dan keselamatan dalam lapangan pekerjaan (S8)
- Pekerja anak / pekerja paksa (S9)
- PPP hak asasi manusia (S10)
- CSR di komunikasi masyarakat (S11)

GRI Utama : **22** GRI Indikator : **51** GRI Sub Indikator : **39**



Tata Kelola

- Keberagaman anggota Dewan (G1)
- Kemandirian Dewan dari kendali pihak lain (G2)
- Dorongan moneter yang terkait dengan *sustainability* (G3)
- Protokol dan perjanjian perundingan bersama (G4)
- Kode Etik Pihak Ketiga (G5)
- Etika dan kepatuhan hukum anti – korupsi (G6)
- Privasi dan perlindungan data pribadi (G7)
- Sustainability Reports* (G8)
- Mekanisme *disclosure* (G9)
- Jaminan Independen (*Independent Assurance*) (G10)
- Transparansi pajak (G11)

GRI Utama : 36
GRI Indikator : 66
GRI Sub Indikator : 33

memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana perusahaan berkomitmen dan berkontribusi terhadap tujuan keberlanjutan global, serta dampaknya terhadap kinerja jangka panjang perusahaan dan pemangku kepentingan.

Rekomendasi kami berfokus pada:

- Pengungkapan terkait faktor GHG *Emission*;
- Penggunaan pilihan “jelaskan” untuk ketentuan-ketentuan yang di bawah aturan “patuhi, jika tidak jelaskan alasan”;
- Proses *assurance* laporan keberlanjutan oleh pihak ketiga independen;
- Keterlibatan tata kelola tertinggi terkait isu LST;
- Tuntunan dan pengawasan kepada perusahaan.

Penjelasan terkait komponen LST BGK Foundation dapat dilihat dalam tabel berikut:

Komponen LST	Faktor LST	Penjelasan
Lingkungan	EI – Emisi GRK (GHG <i>Emissions</i>)	Merupakan emisi gas rumah kaca yang berasal dari penggunaan BBM, listrik, freon, pupuk, kebakaran hutan, dan yang lainnya. Terdiri dari: <i>Scope 1</i> : Emisi yang dihasilkan dari operasional perusahaan seperti BBM, freon, pupuk. <i>Scope 2</i> : Emisi yang dihasilkan dari listrik. <i>Scope 3</i> : Emisi yang dihasilkan dari perjalanan bisnis, produk atau jasa yang dibeli, dan limbah.

E2 - Intensitas GRK (GHG Intensity)	Untuk menghitung efisiensi sumber daya organisasi relatif terhadap nilai ekonomi. Dengan membagi emisi tahunan (pembilang) dengan berbagai ukuran output ekonomi (penyebut).
E3 - Konsumsi Energi (Energy Usage)	Rekapitulasi penggunaan energi seperti penggunaan BBM, listrik, freon, dan yang lainnya.
E4 - Intensitas Energi (Energy Intensity)	Untuk menghitung konsumsi sumber daya organisasi relatif terhadap praktik penggunaan. Dengan membagi konsumsi tahunan (pembilang) dengan berbagai ukuran skala fisik (penyebut) seperti luas kantor, jumlah karyawan, dan sebagainya.
E5 - Energi Mix (Energy Mix)	Biaya, sumber, ketersediaan, dan ketahanan dari energi berdampak langsung pada kemampuan perusahaan seperti penghematan energi.
E6 - Konsumsi Air (Water Usage)	Penggunaan air perusahaan dan sumber air seperti air tanah, sungai, atau PDAM. Bagaimana kebijakan penggunaan air berlaku dalam perusahaan dan sebagainya.
E7 - Peraturan, Prosedur dan Proses (PPP) mengenai Lingkungan (Environmental Operations)	Standar yang muncul mengenai tanggung jawab Environmental menuntut kebijakan dan pelaksanaan secara formal. Perusahaan yang membuat, menerbitkan, dan secara berkala memperbarui dokumen kebijakan terkait Environmental.
E8 - Pengawasan Dewan Direksi Lingkungan (Climate Oversight / Board)	Pengawasan dari Dewan Direksi: misalnya perusahaan memiliki agenda rapat terkait risiko perubahan iklim dalam rapat dewan (sebagai bagian dari agenda resmi) atau memiliki dewan komite yang didedikasikan untuk isu-isu perubahan iklim dapat menjawab faktor ini.
E9 - Pengawasan Manajemen Senior Lingkungan (Climate Oversight / Management)	Pengawasan manajemen: misalnya perusahaan memiliki agenda rapat terkait risiko perubahan iklim dalam rapat manajemen senior (sebagai bagian dari agenda resmi) atau memiliki komite manajemen yang didedikasikan untuk isu-isu yang berkaitan dengan iklim dapat memberikan jawaban untuk faktor ini.
E10 - Pengelolaan dan Analisa Investasi kepada Iklim dan Lingkungan (Climate Risk Mitigation)	Menunjukkan pemahaman tentang bagaimana risiko fisik, risiko transisi, dan peluang perubahan iklim berdampak pada bisnis dari waktu ke waktu. Contoh adanya manajemen risiko perubahan iklim dalam salah satu risiko perusahaan.
E11 - Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR) di Perhutanan (Forestry CSR)	Sebagai tolak ukur kontribusi perusahaan secara langsung terhadap penjagaan dan perawatan hutan Meningkatkan kesadaran manajemen bahwa sektor perhutanan merupakan sektor penting dalam mengalokasikan dana CSR perusahaan.

Komponen LST	Faktor LST	Penjelasan
Sosial	S1 – Perbandingan Gaji CEO (CEO Pay Ratio)	Menunjukkan valuasi dan implikasi biaya perusahaan untuk peran Kepala Eksekutif dibandingkan karyawan lain. Beberapa pemangku kepentingan (terutama investor) menyatakan bahwa metrik ini memungkinkan mereka untuk mengevaluasi dampak potensial kompensasi eksekutif; kesenjangan yang signifikan dalam pembayaran antara CEO dan karyawan perusahaan lainnya.
	S2 – Perbandingan Gaji Antar Gender (Gender Pay Ratio)	Guna menentukan ruang lingkup remunerasi dan dampak dari “kesenjangan gender” dalam perusahaan. Banyak negara telah memperkenalkan undang-undang untuk menegakkan prinsip upah yang setara untuk pekerjaan yang bernilai sama. Isu ini didukung oleh Konvensi ILO. Kesetaraan remunerasi adalah faktor dalam mempertahankan kualifikasi karyawan di tempat kerja. Jika ada ketidakseimbangan, organisasi berisiko terhadap reputasi dan diskriminasi.
	S3 – Persentase Pergantian Karyawan (Employee Turnover)	Persentase relatif karyawan yang berhenti dari perusahaan dapat secara langsung memengaruhi alokasi sumber daya, anggaran, perencanaan, dan produktivitas tingkat pergantian karyawan yang tinggi dapat menunjukkan tingkat ketidakpastian dan ketidakpuasan di antara karyawan, menandakan perubahan mendasar dalam struktur operasi inti organisasi.
	S4 – Persentase Keragaman Gender (Gender Diversity)	Meningkatkan keragaman pemikiran atau ide (sebagaimana diwujudkan dalam pria dan wanita) dapat mengarah pada peningkatan kreativitas, peningkatan produktivitas tim, dan pengurangan ketidakadilan sistemik. Informasi ini dapat menandakan upaya organisasi untuk menerapkan praktik perekrutan inklusif dan penggunaan optimal tenaga kerja serta bakat yang tersedia. Pola promosi dan senioritas yang tidak merata berdasarkan gender dapat menunjukkan risiko yang terkait dengan ketidakadilan di tempat kerja. Beberapa investor secara khusus menargetkan perusahaan yang lebih beragam (atau berbasis gender).
	S5 – Persentase Pekerja Sementara (Temporary Worker Ratio)	Rasio ini memberikan informasi tentang strategi dan manajemen sumber daya manusia. Pengelompokan tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan bagaimana organisasi mengatur sumber daya manusia untuk mengimplementasikan strategi keseluruhannya.

	S6 – PPP Non-Diskriminasi (<i>Non-Discrimination</i>)	Apakah terdapat tindakan diskriminasi dalam perusahaan, seperti dari sisi gaji, perekrutan, dan yang lainnya. Rasio ini memberikan wawasan yang berharga tentang strategi dan manajemen sumber daya manusia terkait perlindungan tertentu. Stakeholder menggunakan metrik ini untuk mengevaluasi kemandirian dan ruang lingkup manajemen risiko perusahaan (ERM).
	S7 – Angka Cedera/ Kecelakaan (<i>Injury Rate</i>)	Tingkat cedera dan absensi yang rendah umumnya terkait dengan tren positif dalam moral dan produktivitas tenaga kerja. Yang diungkapkan terkait jumlah total cedera dan kematian, terhadap total tenaga kerja.
	S8 – Tingkat Kesehatan dan Keselamatan dalam Lapangan Pekerjaan (<i>Global Health and Safety</i>)	Indikator ini mengungkapkan sejauh mana tenaga kerja secara sadar mengetahui kebijakan yang menentukan prinsip-prinsip manajemen kesehatan dan keselamatan.
	S9 – Pekerja Anak / Pekerja Paksa (<i>Child and Forced Labor</i>)	Pekerja anak dan tenaga kerja paksa: kondisi kerja yang bertentangan dengan hukum yang berlaku membuat perusahaan menghadapi risiko yang signifikan.
	S10 – PPP Hak Asasi Manusia (<i>Human Rights</i>)	Kepatuhan terhadap kebijakan hak asasi manusia yang kuat sering mengarah pada peningkatan produktivitas, modal manusia yang lebih baik, dinamika, dan risiko yang lebih rendah.
	S11 – CSR di Komunikasi Masyarakat (<i>Social CSR</i>)	Sebagai tolak ukur kontribusi perusahaan secara langsung terhadap Social eksternal perusahaan Meningkatkan kesadaran manajemen bahwa sektor Social eksternal merupakan sektor penting dalam mengalokasikan dana CSR perusahaan.
Komponen LST		
Faktor LST		Penjelasan
Tata Kelola	G1 – Keberagaman Anggota Dewan (<i>Board Diversity</i>)	Penelitian cenderung menunjukkan peningkatan jumlah wanita dalam anggota dewan memiliki hasil bisnis yang lebih baik, termasuk: kinerja keuangan yang kuat, kemampuan untuk menarik dan mempertahankan talenta top, inovasi yang tinggi, wawasan klien yang meningkat, kinerja yang kuat pada indikator non-keuangan, dan peningkatan efektivitas dewan.
	G2 – Kemandirian Dewan dari Kendali Pihak Lain (<i>Board Independence</i>)	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya berdasarkan: i. eksekutif atau bukan eksekutif; ii. mandiri; iii. masa jabatan badan tata kelola; iv. jumlah posisi dan komitmen signifikan lainnya dari setiap individu, serta sifat dari komitmen; v. jenis kelamin; dan sebagainya.

G3 – Dorongan Moneter yang Terkait dengan Sustainability (<i>Incentivized pay</i>)	Kebijakan remunerasi untuk badan tata kelola tertinggi dan eksekutif dan senior untuk jenis- jenis remunerasi berikut: pesangon, bonus mendaftar/perekrutan, tunjangan pensiun.
G4 – Protokol dan Perjanjian Perundingan Bersama (<i>Collective Bargaining</i>)	Persentase total karyawan yang dicakup oleh perjanjian perundingan kolektif.
G5 – Kode Etik Pihak Ketiga (<i>Supplier Code of Conduct</i>)	Kebijakan perusahaan terkait pihak ketiga seperti supplier, vendor dan yang lainnya terkait isu <i>Social, Environmental, dan Governance</i> .
G6 – Etika dan Kepatuhan Hukum Antikorupsi (<i>Ethics & Anti-Corruption Compliance</i>)	Kasus dan kebijakan terkait korupsi atau <i>fraud</i> perusahaan.
G7 – Privasi dan Perlindungan Data Pribadi (<i>Data Privacy</i>)	Kasus kebocoran data dan bagaimana perlindungan data konsumen dilakukan oleh perusahaan.
G8 – Sustainability Reports (<i>LST Reporting</i>)	Menunjukkan ada atau tidak adanya komunikasi publik mengenai kinerja LST perusahaan, misalnya melalui penyusunan SR, <i>LST Impact Assessment</i> , dan yang lainnya.
G9 – Mekanisme Disclosure (<i>Disclosure Practices</i>)	Mekanisme pengungkapan informasi sesuai GRI, misalnya topik utama dan materialitas harus ditulis dengan melalui keterlibatan pemangku kepentingan.
G10 – Jaminan Independen/ <i>Independent (External) Assurance</i>	Ini menunjukkan validasi dari data keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan melalui berbagai saluran pelaporan.
G11 – Transparansi Pajak (<i>Tax Transparency</i>)	Menunjukkan transparansi perusahaan terkait pendekatan dan tata kelola pajak.

The image features a person's hands holding a small green seedling with four leaves in a clear glass dish filled with brown soil. The background is a soft-focus image of the person's torso in a grey sweater. Overlaid on the scene are several white, futuristic line graphics: a circular diagram with wavy arrows in the top left, a sun-like diagram with radiating lines in the top right, and a circular diagram with a spiral in the bottom left. A semi-transparent green rectangle is positioned in the lower half of the image, containing the word 'TUJUAN' in white capital letters.

TUJUAN

Aspek-aspek terkait LST telah menjadi elemen yang sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Kesadaran global terhadap isu keberlanjutan mendorong perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan. Di berbagai belahan dunia, perusahaan mulai diwajibkan untuk mengintegrasikan aspek LST dalam praktik bisnis mereka melalui regulasi ketat dan standar internasional.

Pengungkapan LST kini menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan investor, pemangku kepentingan, serta daya saing perusahaan di pasar global. Investor semakin selektif dalam memilih perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Pengungkapan yang transparan terkait kinerja LST tidak hanya menjadi tuntutan regulasi, tetapi juga membangun reputasi perusahaan, menarik investor yang sadar keberlanjutan, dan menciptakan nilai jangka panjang. Integrasi LST dalam strategi bisnis merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk tetap relevan, kompetitif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan global.

Analisa pengungkapan LST dari perusahaan nasional diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, regulator, dan masyarakat umum. Data yang disajikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan investasi, keputusan bisnis, maupun sebagai media pengawasan terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan. Melalui pengungkapan yang transparan dan akurat, para pemangku kepentingan dapat menilai sejauh mana perusahaan berkomitmen terhadap keberlanjutan dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.



Secara internal, laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap perusahaan agar kualitas laporan keberlanjutan mereka kedepannya menjadi lebih baik. BGK Foundation berkomitmen untuk melakukan peninjauan secara berkala atas laporan keberlanjutan yang disusun perusahaan, guna memastikan bahwa pengungkapan yang dilakukan tetap relevan, terukur, dan sesuai dengan perkembangan tren keberlanjutan yang ada. Dengan adanya peninjauan dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan perusahaan dapat lebih efektif dalam memenuhi standar keberlanjutan yang diharapkan oleh semua pihak terkait.

Dengan demikian, tujuan utama keterbukaan LST adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan, membantu Indonesia mempercepat pencapaian target *net zero emission*, dan meningkatkan daya saing perusahaan, khususnya perusahaan emiten di Indonesia. Keterbukaan LST juga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi, mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan, dan membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan.

The background of the slide is a collage of financial trading elements. At the top, there's a green rounded rectangle. Below it, a laptop is partially visible. The main area features a white background with a green overlay. On the left, a green triangle with a white dot and a line is shown. In the center, a white card displays trading parameters: 'Stop Loss' with values '-0.01', '-0.1', and '0.27', and 'Take Profit' with values '-0.01' and '+0.1'. To the right, a green line chart is visible. The bottom half of the slide is dominated by a green rounded rectangle containing the word 'METODOLOGI' in white. Below this, a magnifying glass is positioned over a candlestick chart. At the very bottom, there's a bar chart and a line chart with a dashed trend line.

METODOLOGI

“ Penilaian laporan keberlanjutan ini melibatkan 150 perusahaan dengan periode akhir tahun finansial pada 31 Desember 2023.

Proses seleksi dilakukan berdasarkan ketersediaan laporan keberlanjutan yang diterbitkan di *website official* masing-masing perusahaan. Hal ini memastikan bahwa hanya perusahaan yang secara aktif melaporkan praktik keberlanjutan mereka. Selain itu, laporan keberlanjutan yang mengacu pada *Standar Global Reporting Initiative (GRI)* yang akan dipertimbangkan dalam penilaian, sementara laporan yang tidak menggunakan standar tersebut dikecualikan dari penilaian untuk menjaga konsistensi dan kualitas analisis.

Adapun distribusi perusahaan yang dipilih dan dilakukan penilaian mencakup berbagai sektor industri, dengan rincian sebagai berikut:

Sektor	Jumlah Perusahaan	Persentase
Keuangan	30	20%
Energi	25	17%
Barang Konsumen Primer	23	15%
Infrastruktur	20	13%
Barang Baku	17	11%
Properti & Real Estate	8	5%
Perindustrian	6	4%
Kesehatan	5	3%
Lainnya	16	11%
Total Persentase		100%
Perusahaan Emiten		122
Perusahaan Non Emiten		28
Total Perusahaan		150

Selanjutnya, penilaian pengungkapan laporan keberlanjutan setiap perusahaan berfokus pada faktor-faktor berikut:

- Apakah penyusunan laporan keberlanjutan menggunakan *Standar Global Reporting Initiative* (GRI);
- Kapan laporan keberlanjutan diterbitkan;
- Apakah laporan keberlanjutan telah melalui proses *assurance* oleh pihak ketiga independen (AA1000 atau ISAE3000);
- Pengungkapan dari perusahaan berdasarkan penilaian 33 faktor LST;
- Bagaimana perusahaan mempersiapkan laporan keberlanjutan dan seberapa detail informasi yang diungkapkan dalam laporan, serta kesesuaian dengan *Standar Global Reporting Initiative* (GRI).

Dalam menilai kelima poin di atas, BGK Foundation menggunakan metode penilaian kuantitatif untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pengungkapan LST. Suatu pengungkapan dianggap memenuhi kriteria jika perusahaan telah memberikan informasi yang jelas mengenai kepatuhan terhadap setiap faktor LST. Namun, pengungkapan dianggap belum terpenuhi apabila perusahaan tidak memberikan informasi atau alasan atas kurangnya informasi terkait suatu faktor LST. Laporan keberlanjutan yang telah melalui proses *assurance* oleh pihak ketiga independen (AA1000 atau ISAE3000) juga akan mendapatkan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan laporan yang tidak di *assurance*.



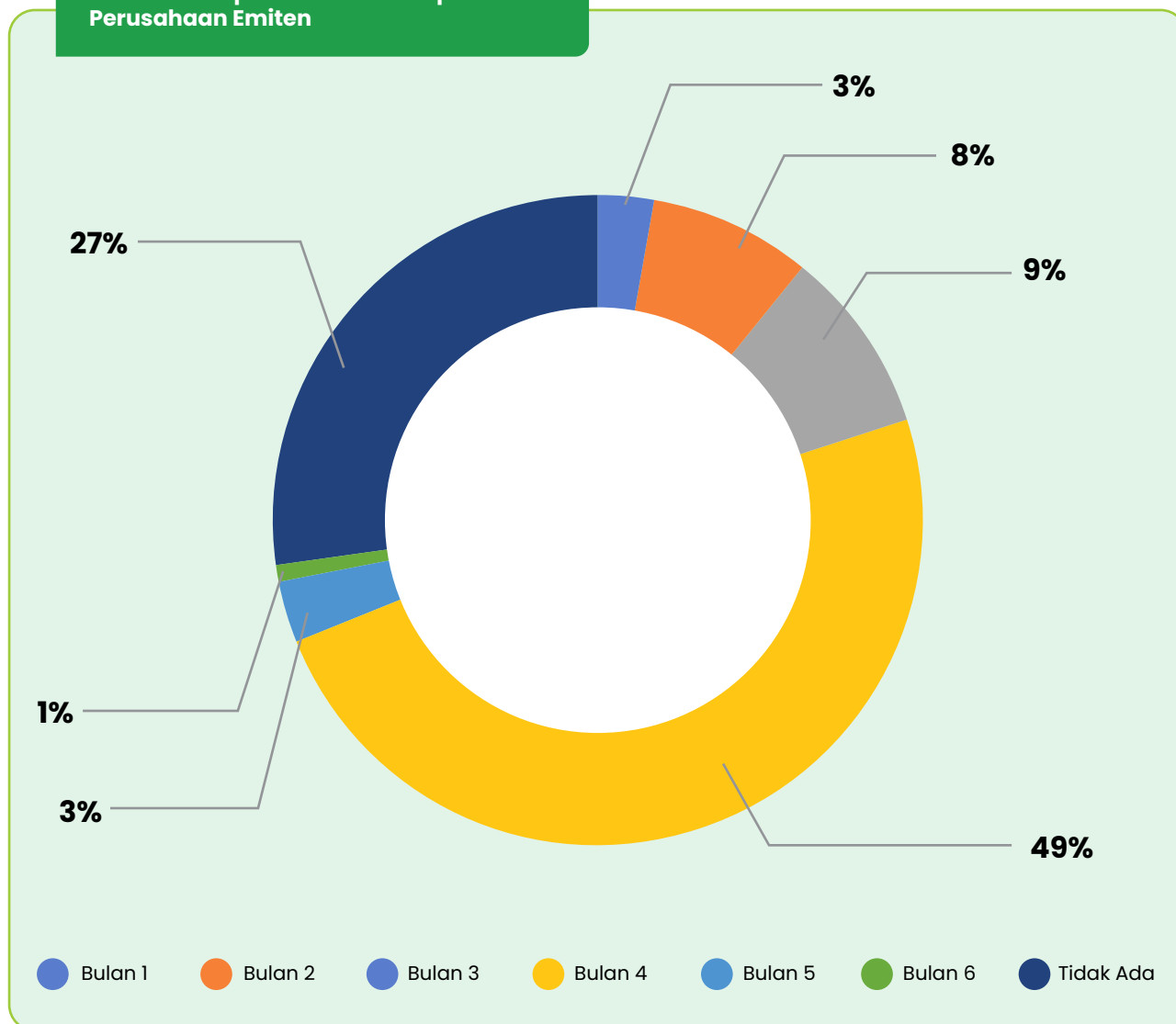


TINGKAT KETEPATAN WAKTU PELAPORAN LAPORAN KEBERLANJUTAN DARI PERIODE TAHUN FISKAL

Berdasarkan data 150 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan, masih terdapat perusahaan yang tidak menyertakan informasi waktu laporan diterbitkan. Dari perusahaan yang mencantumkan informasi tersebut, sebanyak 76% menerbitkan laporan keberlanjutannya antara bulan pertama hingga kedelapan setelah tahun tutup buku fiskal.

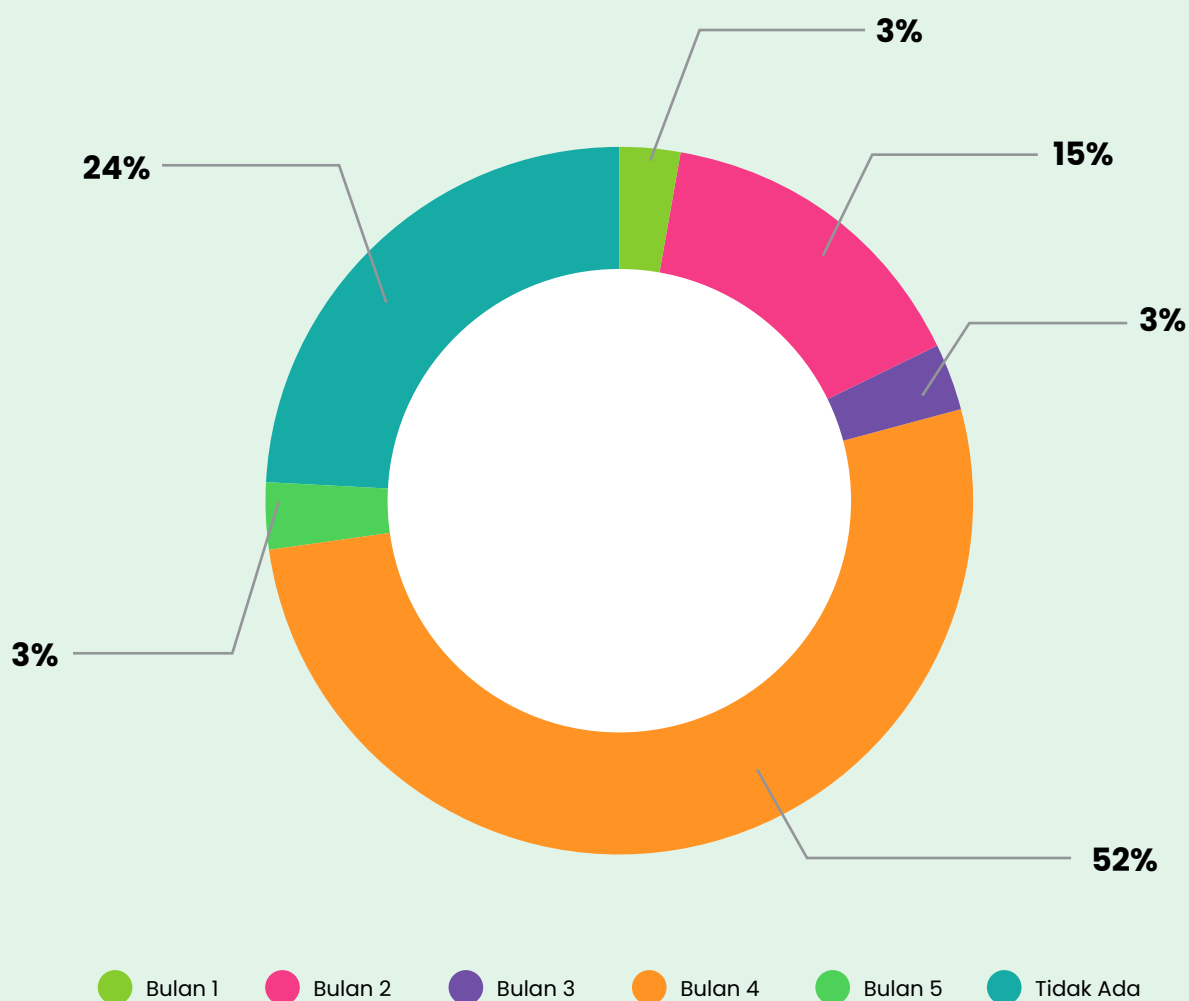
Analisis lebih rinci mengenai ketepatan waktu pelaporan dapat ditinjau melalui grafik yang menyajikan distribusi penerbitan laporan keberlanjutan berdasarkan waktu penerbitan relatif terhadap tahun fiskal berakhir.

Grafik 1. Ketepatan Waktu Pelaporan 122 Perusahaan Emiten



Berdasarkan grafik 1, dapat dilihat bahwa sebanyak 3% perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutannya pada bulan pertama. Diikuti dengan 8% menerbitkan laporan pada bulan kedua dan 9% pada bulan ketiga. Selanjutnya, sebanyak 49% perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan pada bulan keempat, 2% pada bulan kelima, dan 1% pada bulan ketujuh dari tahun fiskal berakhir. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 27% perusahaan tidak menyertakan informasi terkait waktu penerbitan laporan keberlanjutan mereka.

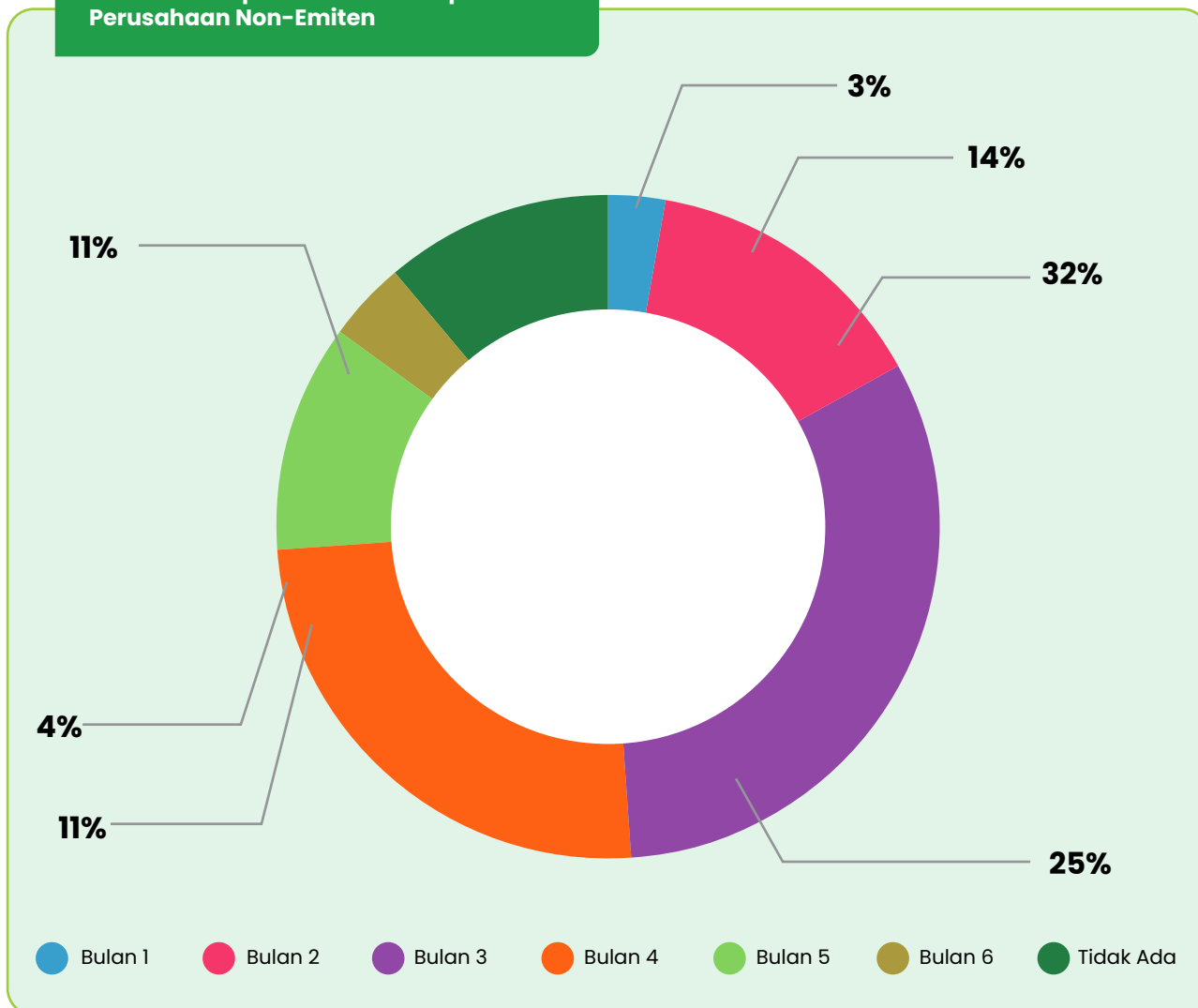
Grafik 2. Ketepatan Waktu Pelaporan 33 Perusahaan Emiten LQ45



Berdasarkan grafik 2, dapat dilihat bahwa sebanyak 3% perusahaan emiten LQ45 menerbitkan laporan keberlanjutannya pada bulan pertama dan 15% pada bulan kedua. Selanjutnya, sebanyak 52% perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan pada bulan keempat dan 3% pada bulan kelima dari tahun fiskal berakhir. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 24% perusahaan tidak menyertakan informasi terkait waktu penerbitan laporan keberlanjutan mereka.

Secara keseluruhan, sebanyak 76% perusahaan emiten LQ45 telah menerbitkan laporan keberlanjutannya sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh regulator nasional. Di mana batas akhir pengumpulan laporan keberlanjutan tahun 2023 ditetapkan paling lambat pada Mei 2024 atau bulan kelima. Adapun tingkat tertinggi pelaporan dari perusahaan emiten LQ45 terjadi pada bulan keempat yang sebesar 52%.

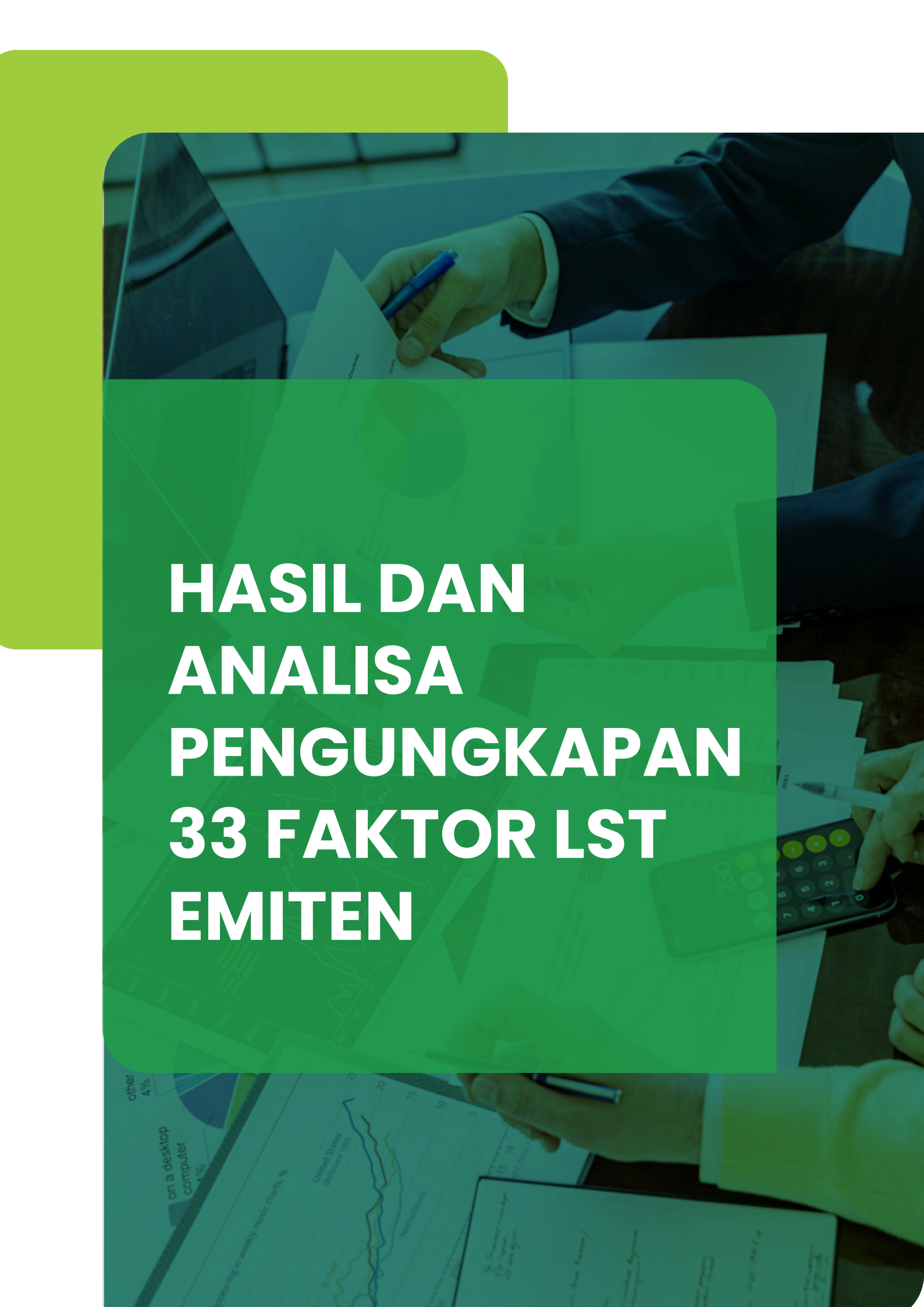
Grafik 3. Ketepatan Waktu Pelaporan 28 Perusahaan Non-Emiten



Selanjutnya, grafik 3 memperlihatkan perusahaan-perusahaan non-emiten memiliki hasil yang lebih bervariasi, dengan waktu penerbitan laporan mulai dari bulan kedua hingga kedelapan. Hasil ini menunjukkan bahwa waktu penerbitan laporan perusahaan non-emiten yang belum memiliki kewajiban menyusun laporan keberlanjutan, sehingga pelaporan masih menyesuaikan dengan kebutuhan rencana kerja masing-masing.

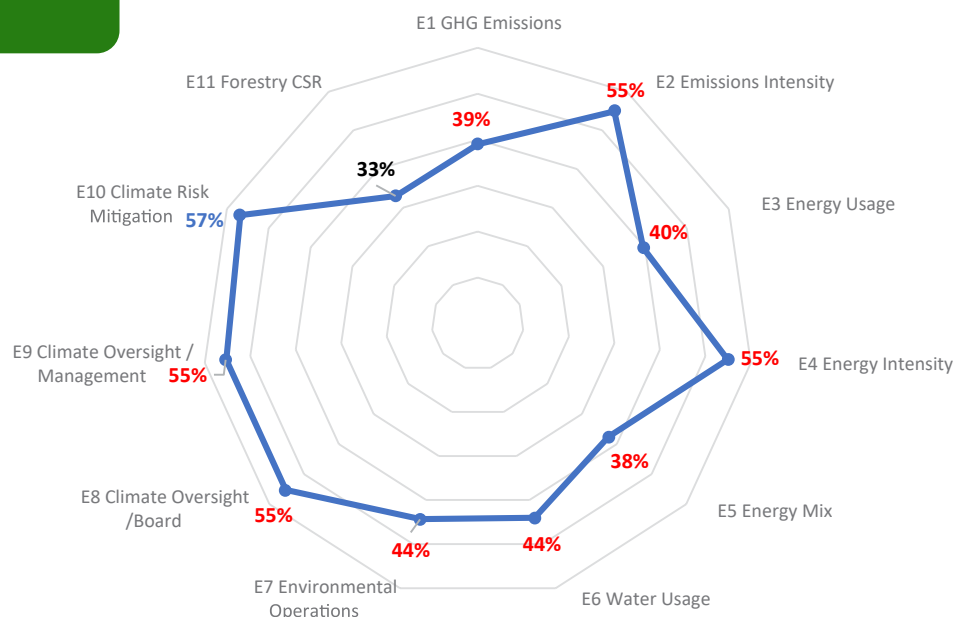
Dari ketiga grafik di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat 24% perusahaan emiten dan non-emiten yang tidak mencantumkan waktu penerbitan laporan keberlanjutan mereka. Hal ini berdasarkan penelusuran kami dari masing-masing laporan keberlanjutan dengan tidak ditemukannya tanggal atau bulan pengesahan dalam laporan keberlanjutan tersebut.

Ketepatan waktu penerbitan laporan keberlanjutan menjadi sangat penting karena secara langsung menunjukkan sejauh mana isu keberlanjutan (LST) diprioritaskan oleh perusahaan. Semakin cepat laporan keberlanjutan diterbitkan, maka semakin cepat pula keputusan bisnis yang berlandaskan keberlanjutan dapat diambil. Selain itu, pengawasan dan evaluasi dari para pemangku kepentingan juga dapat dilakukan lebih cepat, memungkinkan adanya umpan balik yang lebih efisien dan peningkatan yang berkelanjutan dalam kinerja perusahaan terkait LST.



HASIL DAN ANALISA PENGUNGKAPAN 33 FAKTOR LST EMITEN

Pengungkapan Lingkungan 122 Perusahaan Emiten



Nilai rata-rata pengungkapan topik lingkungan dari 122 perusahaan emiten adalah sebesar 47%, dengan pengungkapan tertinggi dan terendah sebagai berikut:

Nilai Pengungkapan Tertinggi:

Climate Risk Mitigation (E10)

57%

Menunjukkan pemahaman tentang bagaimana risiko fisik, risiko transisi, dan peluang perubahan iklim berdampak pada bisnis dari waktu ke waktu. Contoh adanya manajemen risiko perubahan iklim dalam salah satu risiko perusahaan.

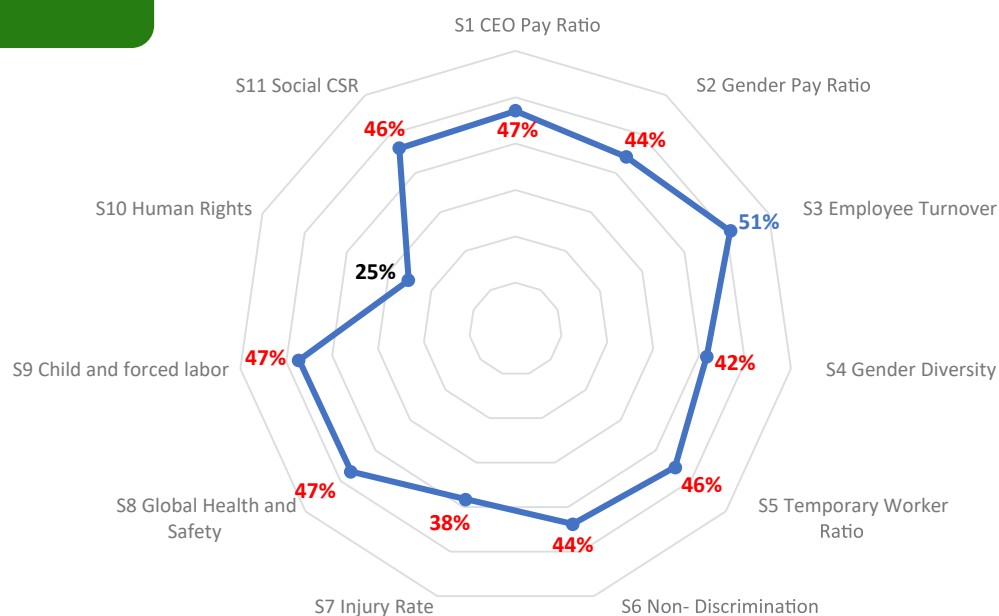
Nilai Pengungkapan Terendah:

Forestry CSR (E11)

33%

Sebagai tolak ukur kontribusi perusahaan secara langsung terhadap penjagaan dan perawatan hutan. Mencerminkan komitmen perusahaan dalam melestarikan lingkungan serta meningkatkan kesadaran manajemen bahwa sektor perhutanan merupakan sektor penting dalam mengalokasikan dana CSR perusahaan.

Pengungkapan Sosial 122 Perusahaan Emiten



Nilai rata-rata pengungkapan topik sosial dari 122 perusahaan emiten adalah sebesar 43%, dengan pengungkapan tertinggi dan terendah sebagai berikut:

Nilai Pengungkapan Tertinggi:

Employee Turnover (S3)

51%

Persentase relatif karyawan yang berhenti atau meninggalkan perusahaan dapat secara langsung memengaruhi alokasi sumber daya, anggaran, perencanaan, dan produktivitas. Tingkat pergantian karyawan yang tinggi dapat menunjukkan tingkat ketidakpastian dan ketidakpuasan di antara karyawan, menandakan perubahan mendasar dalam struktur operasi inti organisasi.

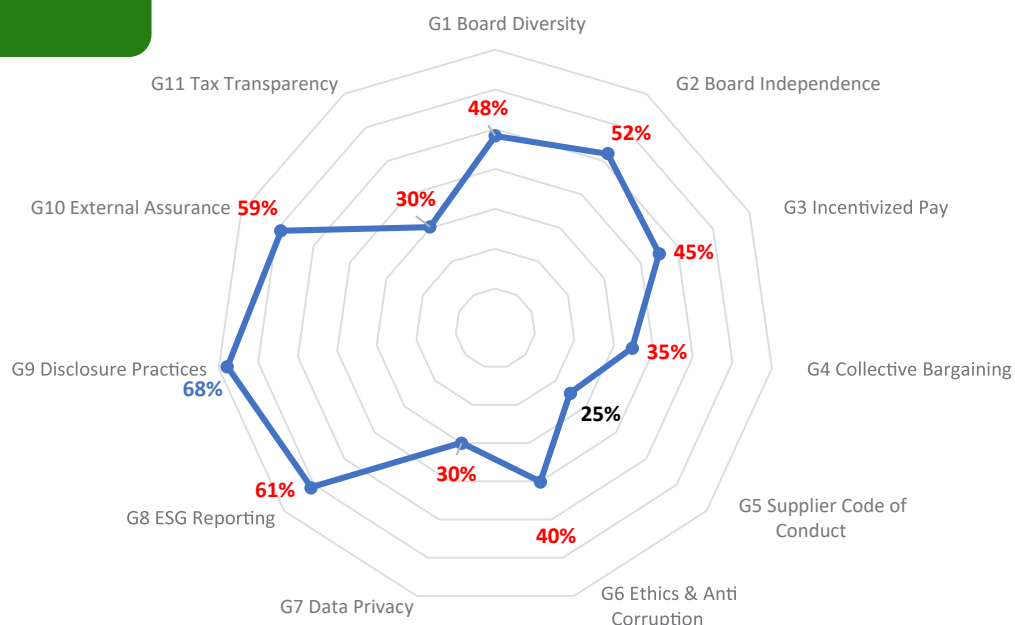
Nilai Pengungkapan Terendah:

Human Rights (S10)

25%

Kepatuhan terhadap kebijakan hak asasi manusia yang kuat sering kali mengarah pada peningkatan produktivitas, pengembangan modal manusia yang lebih baik, dinamika tempat kerja yang lebih positif, dan risiko operasional yang lebih rendah. Dengan memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam lingkungan kerja, perusahaan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi karyawan untuk berkontribusi secara maksimal.

Pengungkapan Tata Kelola 122 Perusahaan Emiten



Nilai rata-rata pengungkapan topik tata kelola dari 122 perusahaan emiten adalah sebesar 45%, dengan pengungkapan tertinggi dan terendah sebagai berikut:

Nilai Pengungkapan Tertinggi:

Disclosure
Practices (G9)

68%

Mekanisme pengungkapan informasi sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative* (GRI), serta mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah penulisan topik utama dan penentuan materialitas yang dilakukan harus melalui keterlibatan pemangku kepentingan.

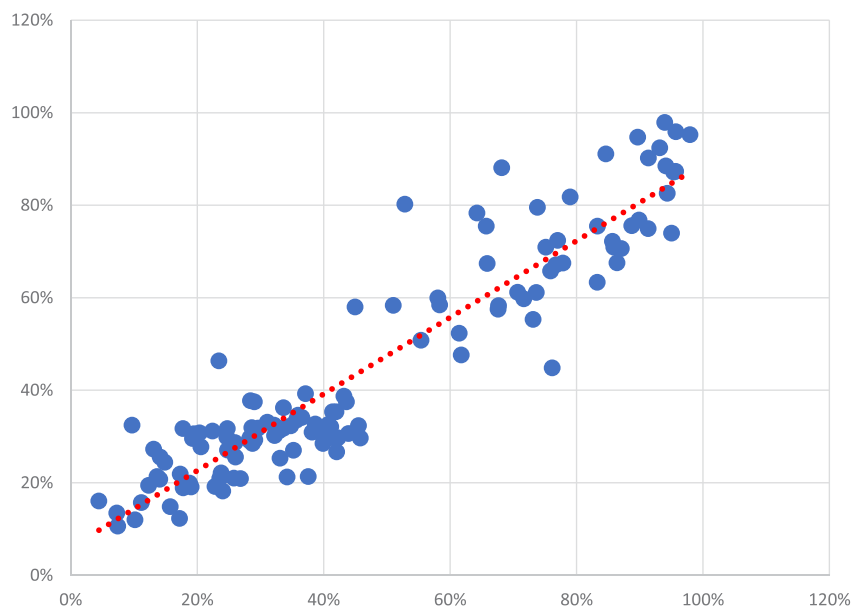
Nilai Pengungkapan Terendah:

Supplier Code
of Conduct (G5)

25%

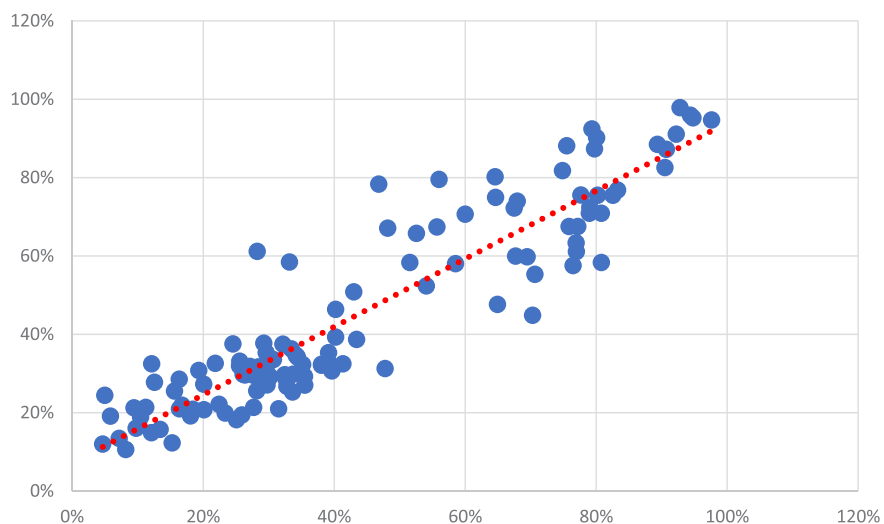
Kebijakan perusahaan terkait pihak ketiga seperti pemasok, vendor, dan mitra bisnis lainnya, merupakan bagian integral dalam memastikan bahwa seluruh rantai pasokan dan operasional bisnis telah mematuhi standar yang tinggi khususnya terkait isu sosial, lingkungan, dan tata kelola.

Hubungan Pengungkapan Lingkungan dan Tata Kelola 122 Perusahaan Emiten



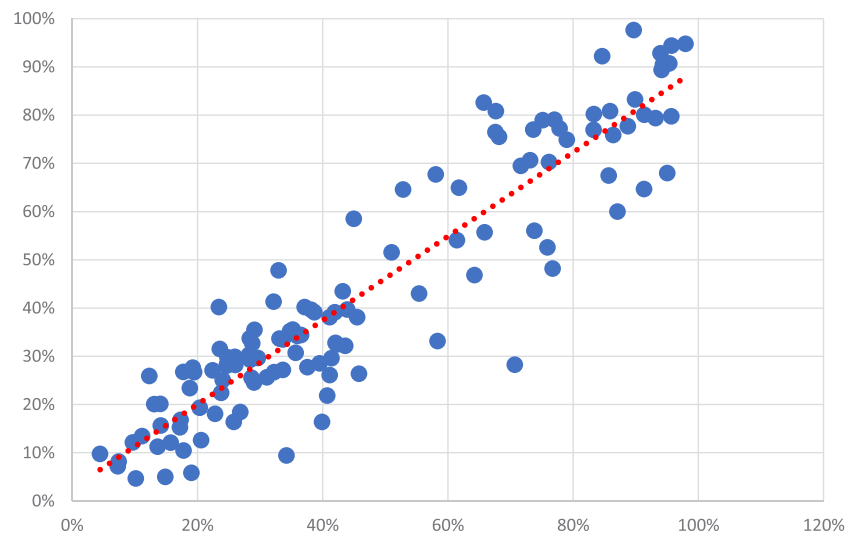
Berdasarkan *scatter plot* di atas, menunjukkan hubungan antara variabel *environment* dan *government* pada masing-masing emiten saham. Dari *trendline* ditunjukkan hubungan positif antara kedua variabel, dimana semakin meningkatnya tingkat *environment*, juga diikuti dengan meningkatnya tingkat *government* nya. Kemudian apabila dilihat dari nilai koefisiennya yakni 82,75% menunjukkan pengaruh variabel *environment* sebesar 82,75% terhadap variabel *government*.

Hubungan Pengungkapan Sosial dan Tata Kelola 122 Perusahaan Emiten



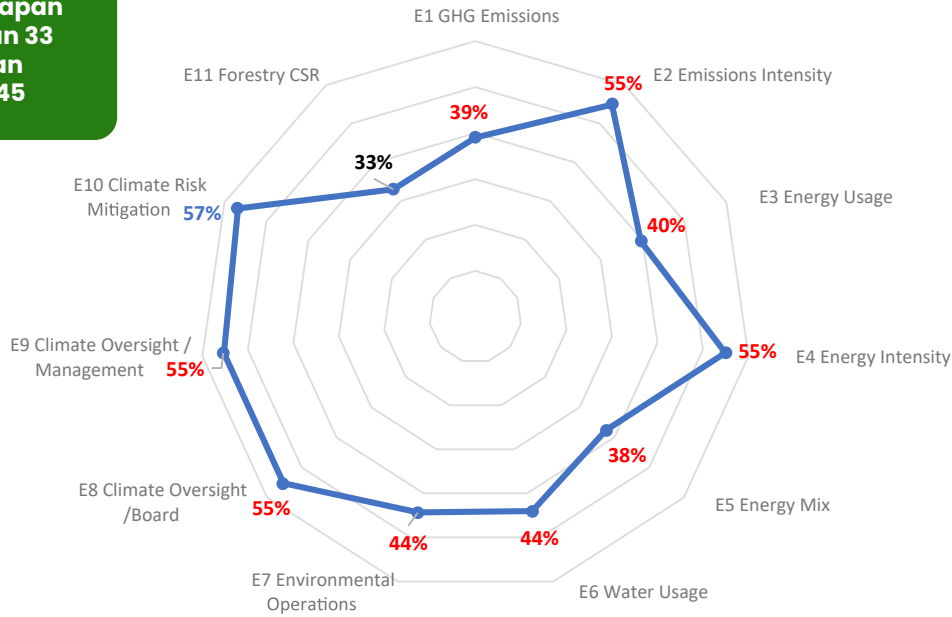
Berdasarkan *scatter plot* di atas, menunjukkan hubungan antara variabel *social* dan *government* pada masing-masing emiten saham. Dari *trendline* ditunjukkan hubungan positif antara kedua variabel, dimana semakin meningkatnya tingkat *social*, juga diikuti dengan meningkatnya tingkat *government* nya. Kemudian apabila dilihat dari nilai koefisiennya yakni 86,79% menunjukkan pengaruh variabel *social* sebesar 86,79% terhadap variabel *government*.

Hubungan Pengungkapan Lingkungan dan Sosial 122 Perusahaan Emiten



Berdasarkan *scatter plot* di atas, menunjukkan hubungan antara variabel *environment* dan *social* pada masing-masing emiten saham. Dari *trendline* ditunjukkan hubungan positif antara kedua variabel, dimana semakin meningkatnya tingkat *environment*, juga diikuti dengan meningkatnya tingkat *social* nya. Kemudian apabila dilihat dari nilai koefisiennya yakni 87,07% menunjukkan pengaruh variabel *environment* sebesar 87,07% terhadap variabel *social*.

Pengungkapan Lingkungan 33 Perusahaan Emiten LQ45



Nilai rata-rata pengungkapan topik lingkungan dari 33 perusahaan emiten LQ45 adalah sebesar 60%, dengan pengungkapan tertinggi dan terendah sebagai berikut:

Nilai Pengungkapan Tertinggi:

Energy Intensity (E4)

71%

Pengungkapan intensitas energi untuk menghitung konsumsi sumber daya organisasi relatif terhadap praktik penggunaan. Perhitungan dilakukan dengan membagi konsumsi tahunan (pembilang) dengan berbagai ukuran skala fisik (penyebut) seperti luas kantor, jumlah karyawan, atau ukuran lainnya.

Climate Risk Mitigation (E10)

71%

Menunjukkan pemahaman tentang bagaimana risiko fisik, risiko transisi, dan peluang perubahan iklim berdampak pada bisnis dari waktu ke waktu. Contoh adanya manajemen risiko perubahan iklim dalam salah satu risiko perusahaan.

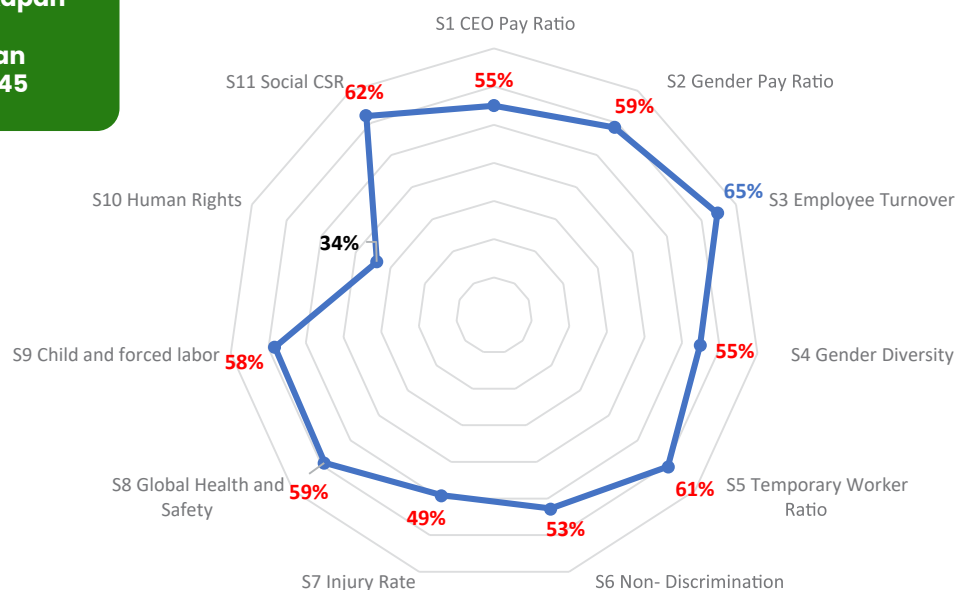
Nilai Pengungkapan Terendah:

Forestry CSR (E11)

46%

Sebagai tolak ukur kontribusi perusahaan secara langsung terhadap penjagaan dan perawatan hutan. Mencerminkan komitmen perusahaan dalam melestarikan lingkungan serta meningkatkan kesadaran manajemen bahwa sektor perhutanan merupakan sektor penting dalam mengalokasikan dana CSR perusahaan.

Pengungkapan Sosial 33 Perusahaan Emiten LQ45



Nilai rata-rata pengungkapan topik sosial dari 33 perusahaan emiten LQ45 adalah sebesar 55%, dengan pengungkapan tertinggi dan terendah sebagai berikut:

Nilai Pengungkapan Tertinggi:

Employee Turnover (S3)

65%

Persentase relatif karyawan yang berhenti atau meninggalkan perusahaan dapat secara langsung memengaruhi alokasi sumber daya, anggaran, perencanaan, dan produktivitas. Tingkat pergantian karyawan yang tinggi dapat menunjukkan tingkat ketidakpastian dan ketidakpuasan di antara karyawan, menandakan perubahan mendasar dalam struktur operasi inti organisasi.

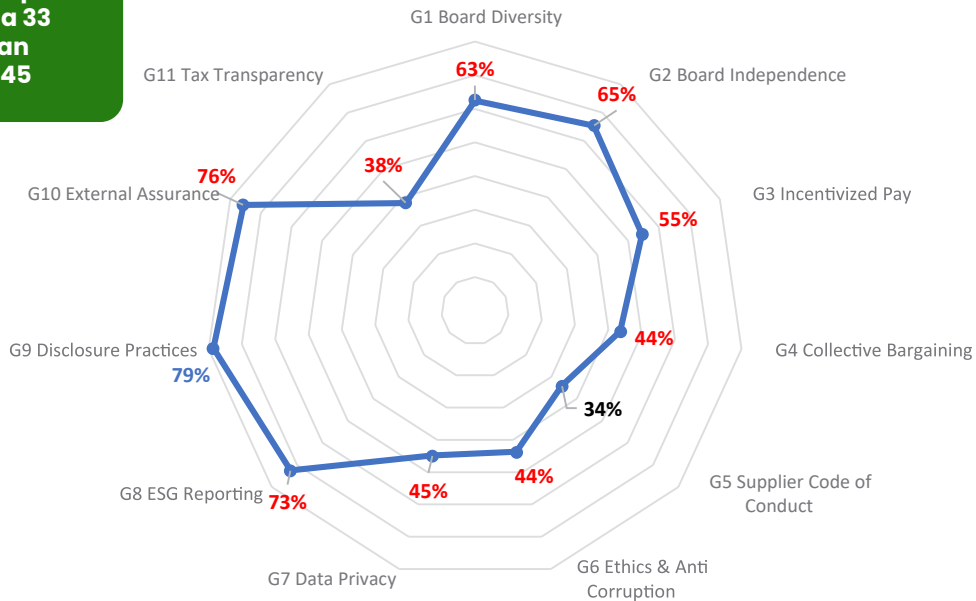
Nilai Pengungkapan Terendah:

Human Rights (S10)

34%

Kepatuhan terhadap kebijakan hak asasi manusia yang kuat sering kali mengarah pada peningkatan produktivitas, pengembangan modal manusia yang lebih baik, dinamika tempat kerja yang lebih positif, dan risiko operasional yang lebih rendah. Dengan memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam lingkungan kerja, perusahaan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi karyawan untuk berkontribusi secara maksimal.

**Pengungkapan
Tata Kelola 33
Perusahaan
Emiten LQ45**



Nilai rata-rata pengungkapan topik tata kelola dari 33 perusahaan emiten LQ45 adalah sebesar 56%, dengan pengungkapan tertinggi dan terendah sebagai berikut:

Nilai Pengungkapan Tertinggi:

**Disclosure
Practices (G9)**

79%

Mekanisme pengungkapan informasi sesuai dengan standar Global Reporting Initiative (GRI), serta mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah penulisan topik utama dan penentuan materialitas yang dilakukan harus melalui keterlibatan pemangku kepentingan.

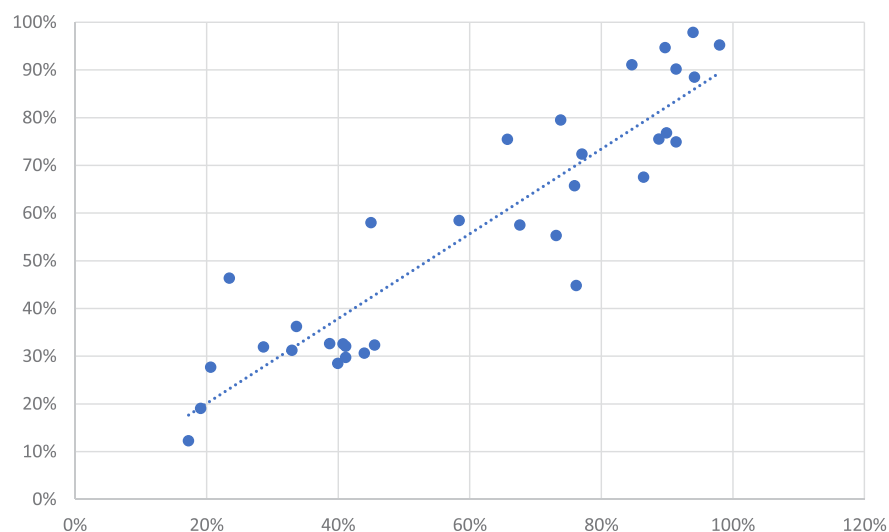
Nilai Pengungkapan Terendah:

**Supplier Code of
Conduct (G5)**

34%

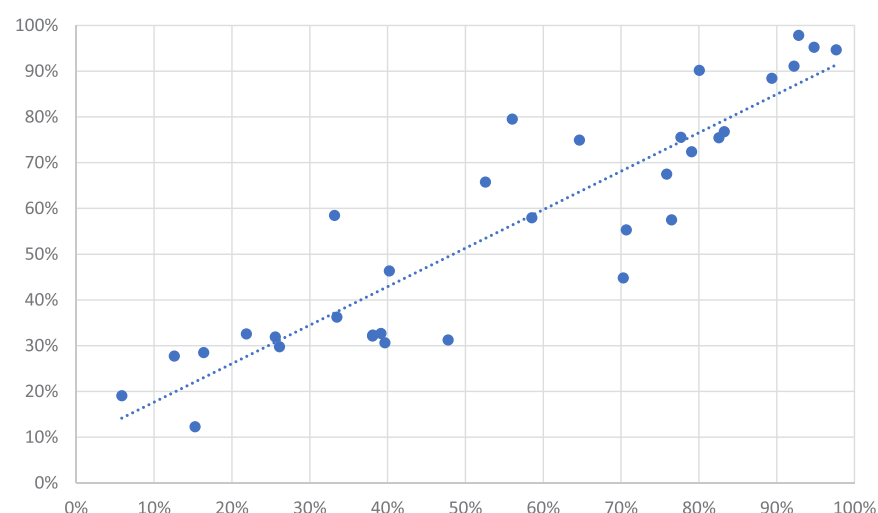
Kebijakan perusahaan terkait pihak ketiga seperti pemasok, vendor, dan mitra bisnis lainnya, merupakan bagian integral dalam memastikan bahwa seluruh rantai pasokan dan operasional bisnis telah mematuhi standar yang tinggi khususnya terkait isu sosial, lingkungan, dan tata kelola.

Hubungan Pengungkapan Lingkungan dan Tata Kelola 33 Perusahaan Emiten LQ45



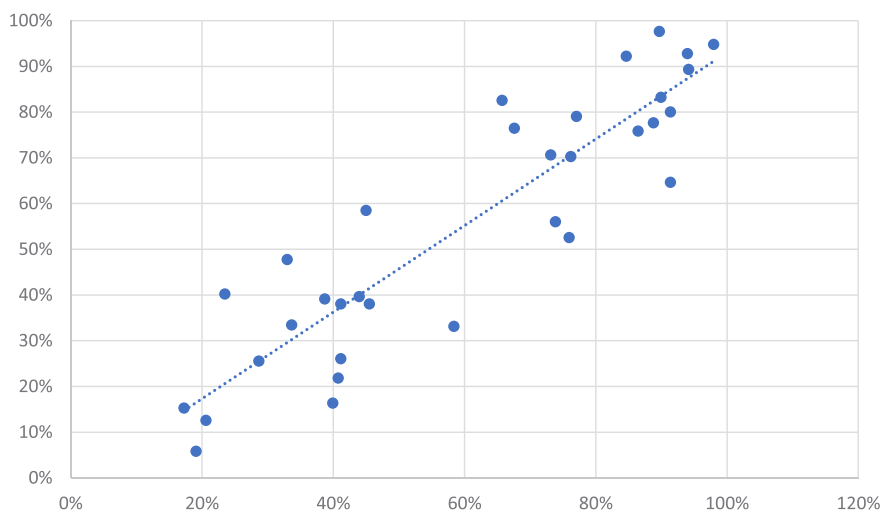
Berdasarkan *scatter plot* di atas, menunjukkan hubungan antara variabel *environment* dan *government* pada masing-masing emiten saham. Dari *trendline* ditunjukkan hubungan positif antara kedua variabel, dimana semakin meningkatnya tingkat *environment*, juga diikuti dengan meningkatnya tingkat *government* nya. Kemudian apabila dilihat dari nilai koefisiennya yakni 88,82% menunjukkan pengaruh variabel *environment* sebesar 88,82% terhadap variabel *government*.

Hubungan Pengungkapan Lingkungan dan Tata Kelola 33 Perusahaan Emiten LQ45



Berdasarkan *scatter plot* di atas, menunjukkan hubungan antara variabel *social* dan *government* pada masing-masing emiten saham. Dari *trendline* ditunjukkan hubungan positif antara kedua variabel, dimana semakin meningkatnya tingkat *social*, juga diikuti dengan meningkatnya tingkat *government* nya. Kemudian apabila dilihat dari nilai koefisien nya yakni 84,13% menunjukkan pengaruh variabel *social* sebesar 84,13% terhadap variabel *government*.

Hubungan Pengungkapan Lingkungan dan Sosial 33 Perusahaan Emiten LQ45



Berdasarkan *scatter plot* di atas, menunjukan hubungan antara variabel *environment* dan *social* pada masing-masing emiten saham. Dari *trendline* ditunjukkan hubungan positif antara kedua variabel, dimana semakin meningkatnya tingkat *environment*, juga diikuti dengan meningkatnya tingkat *social* nya. Kemudian apabila dilihat dari nilai koefisien nya yakni 86% menunjukan pengaruh variabel *social* sebesar 86% terhadap variabel *environment*.

Skor Pengungkapan LST 150 Perusahaan Nasional

Kode Saham	Perusahaan	Climate Change	Natural Resources	Polution and Waste	Opportunities and Policy	Human Capital	Relations	Corporate Governance	Corporate Behavior	Product Responsibility	Total ESG Disclosure
ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	100%	98%	99%	97%	96%	84%	100%	92%	90%	96%
ABMM	PT ABM Investama Tbk	100%	100%	87%	92%	94%	100%	93%	98%	100%	95%
PTBA	PT Bukit Asam Tbk	95%	96%	87%	93%	93%	91%	98%	99%	93%	95%
BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100%	100%	46%	85%	98%	98%	100%	88%	100%	94%
TINS	PT Timah Tbk	95%	96%	97%	95%	90%	93%	88%	86%	93%	91%
ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	95%	98%	86%	92%	89%	93%	89%	87%	93%	91%
BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	100%	72%	99%	86%	92%	93%	95%	86%	100%	89%
POWR	PT Cikarang Listrindo Tbk	94%	96%	99%	92%	91%	83%	75%	95%	60%	89%
BJBR	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	100%	100%	67%	89%	77%	100%	86%	98%	100%	88%
INCO	PT Vale Indonesia Tbk	100%	96%	96%	94%	79%	89%	85%	97%	50%	88%
BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	95%	88%	91%	93%	79%	92%	95%	84%	100%	87%
PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	94%	93%	76%	88%	84%	81%	65%	86%	92%	83%
PGEO	PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	95%	86%	86%	89%	76%	90%	66%	91%	45%	81%
BUMI	PT Bumi Resources Tbk	85%	73%	87%	92%	80%	87%	81%	86%	0%	80%
INDY	PT Indika Energy Tbk	100%	75%	87%	90%	79%	95%	72%	84%	0%	79%
ANJT	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	100%	96%	86%	94%	65%	94%	96%	66%	0%	79%
DOID	PT Delta Dunia Makmur Tbk	76%	82%	45%	86%	76%	61%	71%	91%	90%	79%
BTPN	PT Bank BTPN Tbk	88%	66%	33%	69%	75%	84%	75%	100%	95%	77%
ASII	PT Astra International Tbk	100%	96%	86%	84%	62%	91%	67%	79%	95%	77%
MBMA	PT Merdeka Battery Materials Tbk	83%	77%	71%	75%	80%	66%	80%	79%	0%	76%
UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	86%	89%	99%	81%	75%	84%	63%	78%	33%	77%

Kode Saham	Perusahaan	Climate Change	Natural Resources	Pollution and Waste	Opportunities and Policy	Human Capital	Relations	Corporate Governance	Corporate Behavior	Product Responsibility	Total ESG Disclosure
WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk	85%	86%	96%	84%	70%	38%	74%	85%	0%	75%
WEGE	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	85%	57%	80%	88%	77%	95%	73%	83%	0%	75%
MEDC	PT Medco Energi Internasional Tbk	82%	65%	66%	58%	83%	82%	64%	89%	63%	75%
DSNG	PT Dharma Satya Nusantara Tbk	83%	77%	77%	91%	76%	82%	61%	79%	0%	75%
MDKA	PT Merdeka Copper Gold Tbk	78%	75%	90%	78%	76%	88%	73%	76%	0%	74%
WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	100%	99%	85%	69%	60%	63%	72%	84%	0%	73%
PTRO	PT Petrosea Tbk	75%	72%	61%	78%	76%	84%	57%	78%	0%	71%
BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	85%	67%	72%	75%	54%	76%	65%	90%	100%	70%
DEWA	PT Darma Henwa Tbk	68%	61%	97%	67%	83%	64%	54%	74%	0%	69%
TOWR	PT Sarana Menara Nusantara Tbk	70%	67%	63%	68%	74%	100%	55%	63%	43%	67%
BRMS	PT Bumi Resources Minerals Tbk	68%	80%	57%	68%	73%	36%	62%	69%	0%	67%
INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	80%	63%	86%	77%	71%	68%	63%	59%	0%	66%
EMTK	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	62%	38%	33%	68%	62%	91%	70%	87%	100%	66%
JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	85%	72%	31%	86%	48%	97%	66%	79%	0%	65%
BNGA	PT Bank CIMB Niaga Tbk	89%	75%	67%	74%	46%	70%	44%	83%	100%	64%
SIDO	PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk	82%	77%	61%	76%	70%	72%	44%	54%	0%	64%
BJTM	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	95%	71%	13%	55%	51%	9%	57%	95%	100%	63%
GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	73%	68%	36%	67%	54%	74%	45%	83%	100%	63%
CITA	PT Cita Mineral Investindo Tbk	68%	62%	87%	42%	65%	100%	66%	66%	0%	62%
NCKL	PT Trimegah Bangun Persada Tbk	89%	22%	87%	81%	62%	91%	33%	72%	0%	58%
DSSA	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	73%	49%	56%	69%	51%	82%	45%	70%	0%	56%

Kode Saham	Perusahaan	Climate Change	Natural Resources	Polution and Waste	Opportunities and Policy	Human Capital	Relations	Corporate Governance	Corporate Behavior	Product Responsibility	Total ESG Disclosure
BRIS	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	22%	19%	79%	74%	57%	75%	43%	65%	100%	54%
BANK	PT Bank Aladin Syariah Tbk	70%	47%	38%	49%	52%	45%	39%	71%	93%	54%
BDMN	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	73%	75%	46%	72%	27%	45%	48%	67%	100%	53%
BBCA	PT Bank Central Asia Tbk	27%	45%	86%	80%	27%	90%	32%	77%	100%	50%
TBIG	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	64%	55%	41%	55%	45%	21%	48%	64%	0%	50%
TPIA	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	41%	48%	39%	40%	43%	45%	41%	38%	30%	42%
ELSA	PT Elnusa Tbk	39%	30%	43%	42%	39%	52%	40%	47%	0%	39%
SSMS	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	37%	43%	38%	45%	38%	55%	34%	34%	48%	39%
SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	39%	45%	46%	49%	37%	50%	38%	34%	0%	39%
ADMR	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	41%	44%	45%	46%	39%	45%	36%	32%	0%	38%
TOBA	PT TBS Energi Utama Tbk	44%	34%	53%	51%	31%	45%	35%	42%	25%	38%
ADRO	PT Adaro Energy Indonesia Tbk	36%	33%	23%	34%	41%	98%	35%	34%	0%	37%
ISAT	PT Indosat Tbk	38%	44%	32%	42%	37%	45%	22%	39%	46%	37%
AKRA	PT AKR Corporindo Tbk	37%	39%	25%	42%	39%	41%	32%	31%	46%	37%
GOTO	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	16%	21%	47%	24%	44%	0%	18%	65%	97%	37%
SMCB	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	39%	39%	46%	35%	41%	31%	35%	33%	0%	36%
AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	50%	32%	42%	47%	28%	42%	40%	38%	0%	35%
BIRD	PT Blue Bird Tbk	48%	14%	30%	43%	44%	17%	32%	39%	0%	35%
STAA	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk	48%	20%	43%	46%	36%	17%	33%	42%	0%	35%
JAWA	PT Jaya Agra Wattie Tbk	42%	41%	30%	29%	35%	24%	34%	33%	46%	35%
PPRO	PT PP Properti Tbk	48%	45%	42%	37%	36%	2%	32%	33%	0%	35%
EXCL	PT XL Axiata Tbk	42%	28%	15%	40%	34%	24%	34%	46%	0%	34%
BNII	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	36%	35%	17%	38%	35%	39%	29%	32%	48%	34%
PSGO	PT Palma Serasih Tbk	48%	48%	33%	46%	27%	18%	26%	39%	0%	34%

Kode Saham	Perusahaan	Climate Change	Natural Resources	Pollution and Waste	Opportunities and Policy	Human Capital	Relations	Corporate Governance	Corporate Behavior	Product Responsibility	Total ESG Disclosure
PTPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	41%	47%	41%	38%	32%	41%	24%	32%	13%	34%
LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk	36%	35%	31%	37%	33%	9%	31%	36%	38%	33%
PWON	PT Pakuwon Jati Tbk	37%	42%	42%	38%	30%	13%	27%	31%	45%	33%
TAPG	PT Triputra Agro Persada Tbk	35%	34%	36%	37%	35%	45%	28%	31%	0%	33%
SMRA	PT Summarecon Agung Tbk	45%	40%	40%	40%	25%	37%	27%	39%	0%	32%
INPC	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	6%	35%	13%	36%	19%	0%	36%	37%	49%	32%
INTP	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	45%	32%	43%	47%	22%	19%	32%	40%	0%	32%
INPP	PT Indonesian Paradise Property Tbk	33%	29%	21%	30%	35%	41%	21%	33%	50%	31%
CRSN	PT Carsurin Tbk	39%	30%	17%	39%	29%	11%	30%	40%	0%	31%
ARCI	PT Archi Indonesia Tbk	35%	29%	24%	39%	35%	23%	24%	31%	0%	31%
NISP	PT Bank OCBC NISP Tbk	37%	30%	16%	25%	34%	32%	28%	32%	25%	31%
JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk	39%	14%	42%	38%	28%	42%	32%	38%	0%	30%
SCMA	PT Surya Citra Media Tbk	31%	21%	22%	37%	23%	39%	31%	42%	48%	30%
HRUM	PT Harum Energy Tbk	31%	28%	28%	29%	35%	11%	28%	30%	25%	30%
ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	34%	15%	50%	41%	24%	41%	31%	42%	0%	30%
BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk	30%	27%	32%	39%	25%	42%	25%	33%	45%	30%
LPIN	PT Multi Prima Sejahtera Tbk	31%	21%	21%	35%	31%	27%	31%	33%	0%	29%
META	PT Nusantara Infrastructure Tbk	34%	33%	33%	45%	29%	15%	11%	36%	0%	29%
AMRT	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	9%	28%	26%	40%	27%	9%	29%	42%	0%	29%
MERK	PT Merck Tbk	28%	28%	23%	20%	31%	8%	33%	28%	46%	28%
KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	48%	37%	36%	40%	17%	12%	17%	37%	46%	28%
IPCM	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	34%	18%	15%	32%	30%	32%	22%	41%	0%	28%
SRTG	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	44%	0%	16%	42%	26%	47%	28%	38%	0%	28%
KAEF	PT Kimia Farma Tbk	14%	20%	43%	30%	28%	51%	19%	41%	0%	27%

Kode Saham	Perusahaan	Climate Change	Natural Resources	Pollution and Waste	Opportunities and Policy	Human Capital	Relations	Corporate Governance	Corporate Behavior	Product Responsibility	Total ESG Disclosure
HERO	PT Hero Supermarket Tbk	5%	19%	32%	33%	28%	22%	35%	33%	0%	27%
TOTL	PT Total Bangun Persada Tbk	0%	34%	18%	33%	26%	48%	14%	33%	42%	27%
MEGA	PT Bank Mega Tbk	8%	16%	23%	28%	28%	9%	22%	40%	25%	26%
ASGR	PT Astra Graphia Tbk	9%	11%	26%	31%	27%	33%	30%	26%	46%	25%
BTPS	PT Bank BTPN Syariah Tbk	2%	18%	16%	26%	26%	32%	29%	32%	48%	25%
PJAA	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	6%	30%	26%	26%	31%	36%	15%	31%	0%	25%
TLKM	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	9%	9%	25%	37%	19%	27%	20%	38%	50%	23%
MYOR	PT Mayora Indah Tbk	29%	24%	19%	22%	23%	20%	18%	30%	0%	23%
AGII	PT Samator Indo Gas Tbk D/H PT Aneka Gas Tbk	30%	27%	19%	19%	25%	27%	17%	23%	0%	22%
AGRO	PT Bank Raya Indonesia Tbk	3%	36%	17%	32%	17%	32%	16%	28%	11%	22%
UNTR	PT United Tractors Tbk	33%	25%	43%	42%	9%	15%	16%	31%	0%	22%
IPCC	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	31%	19%	16%	32%	17%	8%	16%	31%	0%	21%
LPLI	PT Star Pasific Tbk	23%	22%	19%	13%	24%	18%	17%	26%	0%	21%
ACES	PT Ace Hardware Indonesia Tbk	0%	19%	9%	36%	13%	6%	23%	38%	0%	20%
PNBN	PT Bank Pan Indonesia Tbk	0%	0%	7%	34%	17%	53%	30%	20%	50%	20%
ISSP	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	2%	31%	23%	25%	17%	27%	13%	29%	0%	20%
COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	0%	21%	16%	9%	29%	0%	23%	20%	0%	19%
PSSI	PT IMC Pelita Logistik Tbk	15%	23%	19%	13%	17%	11%	20%	28%	0%	19%
IBST	PT Inti Bangun Sejahtera Tbk	0%	3%	33%	28%	16%	15%	26%	31%	0%	18%
ADMF	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	5%	9%	16%	23%	21%	14%	15%	31%	0%	18%
MAYA	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	0%	0%	7%	25%	12%	9%	24%	38%	50%	18%
CSRA	PT Cisadane Sawit Raya Tbk	1%	12%	16%	33%	9%	23%	17%	25%	0%	16%
WSKT	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	0%	5%	19%	28%	9%	36%	11%	36%	0%	15%

Kode Saham	Perusahaan	Climate Change	Natural Resources	Pollution and Waste	Opportunities and Policy	Human Capital	Relations	Corporate Governance	Corporate Behavior	Product Responsibility	Total ESG Disclosure
CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	6%	14%	18%	26%	16%	13%	13%	14%	0%	15%
BNLI	PT Bank Permata Tbk	8%	8%	15%	25%	5%	9%	9%	35%	48%	15%
BRPT	PT Barito Pacific Tbk	9%	10%	16%	34%	5%	15%	18%	24%	0%	15%
HMSP	PT HM Sampoerna Tbk	18%	15%	18%	15%	12%	9%	14%	18%	0%	14%
KEEN	PT Kencana Energi Lestari Tbk	0%	5%	26%	19%	13%	15%	7%	28%	0%	13%
BBMD	PT Bank Mestika Dharma Tbk	0%	5%	15%	3%	10%	5%	3%	29%	21%	10%
ADES	PT Akasha Wira International Tbk	0%	9%	16%	7%	7%	10%	7%	22%	0%	9%
INAF	PT Indofarma Tbk	5%	20%	19%	1%	4%	7%	5%	22%	0%	9%
BEKS	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	2%	6%	8%	12%	8%	14%	6%	13%	25%	9%
Private Company	PT Pupuk Kalimantan Timur	95%	96%	84%	95%	95%	93%	96%	86%	79%	95%
Private Company	PT Pertamina (Persero)	95%	86%	87%	98%	95%	91%	98%	98%	95%	95%
Private Company	PT Pupuk Indonesia (Persero)	95%	96%	100%	96%	94%	96%	100%	96%	0%	93%
Private Company	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	100%	96%	87%	92%	93%	100%	100%	85%	0%	91%
Private Company	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	95%	96%	87%	92%	85%	99%	99%	84%	0%	88%
Private Company	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	95%	96%	86%	90%	81%	97%	97%	84%	0%	86%
Private Company	PT Kilang Pertamina Internasional	95%	95%	86%	89%	74%	91%	96%	86%	0%	84%
Private Company	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	100%	91%	86%	83%	72%	77%	81%	89%	93%	82%
Private Company	PT Indonesia Asahan Aluminium	82%	77%	78%	73%	81%	93%	80%	89%	93%	81%
Private Company	PT PLN Nusantara Power	95%	94%	65%	90%	75%	85%	72%	87%	0%	79%
Private Company	PT Angkasa Pura I (Persero)	77%	93%	59%	62%	86%	91%	66%	92%	0%	78%
Private Company	PT PLN Indonesia Power	95%	96%	87%	94%	65%	93%	64%	84%	0%	76%
Private Company	PT Tripatra	86%	85%	62%	72%	73%	15%	45%	84%	0%	68%

Kode Saham	Perusahaan	Climate Change	Natural Resources	Pollution and Waste	Opportunities and Policy	Human Capital	Relations	Corporate Governance	Corporate Behavior	Product Responsibility	Total ESG Disclosure
Private Company	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	82%	75%	32%	66%	37%	58%	37%	62%	0%	51%
Private Company	PT Mitra Maju Sukses (MMS) Group Indonesia	48%	48%	43%	45%	43%	47%	46%	37%	0%	43%
Private Company	PT Federal International Finance	42%	25%	43%	39%	28%	33%	27%	41%	49%	33%
Private Company	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)	38%	25%	32%	37%	28%	42%	35%	39%	25%	32%
Private Company	PT Sinar Mas Land	42%	33%	43%	40%	27%	41%	29%	31%	25%	32%
Private Company	PT Perum Peruri (Persero)	33%	34%	30%	34%	23%	40%	21%	28%	36%	28%
Private Company	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	9%	10%	17%	31%	37%	17%	23%	33%	0%	26%
Private Company	PT Pegadaian (Persero)	6%	8%	16%	28%	32%	12%	30%	32%	0%	25%
Private Company	PT Prudential Life Assurance	35%	26%	18%	25%	18%	11%	20%	34%	46%	24%
Private Company	PT Bank DKI	0%	0%	16%	20%	27%	28%	14%	27%	48%	20%
Private Company	PT Mandiri Capital Indonesia	0%	0%	22%	29%	17%	35%	26%	31%	0%	19%
Private Company	PT Permodalan Nasional Madani	6%	8%	15%	22%	23%	32%	11%	29%	0%	18%
Private Company	PT Bank Aceh Syariah	0%	5%	17%	24%	16%	20%	15%	31%	39%	18%
Private Company	PT Asuransi Jasa Indonesia	0%	3%	11%	13%	18%	52%	12%	30%	0%	16%
Private Company	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	5%	5%	16%	12%	7%	36%	10%	31%	0%	12%

Keterangan

	Leadership AAA	91	-	100
	Leadership AA	81	-	90
	Leadership A	71	-	80
	Management BBB	61	-	70
	Management BB	51	-	60
	Management B	41	-	50
	Commitment CCC	31	-	40
	Commitment CC	21	-	30
	Commitment C	11	-	20
	Awareness	0	-	10

Penjelasan

Berdasarkan tabel di atas, dari total 150 perusahaan terdapat 28 perusahaan non-emiten. Pada perusahaan non-emiten, tingkat pengungkapan tertinggi ada pada topik *Relations* dan *Corporate Behavior*. *Relations* dalam konteks ini merujuk pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang menjadi bagian penting dari pengungkapan dalam laporan keberlanjutan. Hampir seluruh perusahaan yang menyusun laporan keberlanjutan secara konsisten mengungkapkan kegiatan CSR sosial mereka. Hal ini mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan pelestarian budaya.

CSR memiliki pengaruh yang signifikan dalam setiap proses pembangunan karena memungkinkan perusahaan untuk berkontribusi secara langsung dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan. Melalui program-program CSR, perusahaan dapat menjawab berbagai tantangan sosial dan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Partisipasi ini menjadi elemen penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada dampak positif jangka panjang terhadap masyarakat dan ekosistem.

Selain itu, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas, tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari ekosistem tempat mereka beroperasi. Tanggung jawab ini mencerminkan prinsip keberlanjutan yang menempatkan perusahaan sebagai bagian integral dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan pelestarian lingkungan. Dengan melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan dapat mewujudkan komitmen tersebut secara nyata, baik melalui program pemberdayaan masyarakat, inisiatif lingkungan, maupun kegiatan filantropi lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang.

Adapun dalam aspek *Corporate Behavior*, isu anti-korupsi menjadi salah satu perhatian utama yang dibahas secara intensif oleh perusahaan. Kesadaran terhadap potensi risiko kecurangan dan kerugian akibat praktik korupsi mendorong banyak perusahaan untuk mengadopsi kebijakan pencegahan yang lebih ketat dan proaktif. Langkah-langkah seperti penerapan program pelatihan anti-korupsi, pembuatan kebijakan etika bisnis, dan pembentukan unit khusus yang menangani pengawasan dan audit internal sering kali diterapkan sebagai bagian dari upaya ini.

Pencegahan korupsi menjadi prioritas di setiap lini perusahaan, karena risiko yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga dapat mencakup hilangnya kepercayaan publik, kerusakan reputasi perusahaan, potensi sanksi hukum yang berat, dan dapat berdampak pada stabilitas operasional perusahaan serta kemampuannya untuk bersaing di pasar.

Dengan adanya implementasi kebijakan anti-korupsi yang kuat, mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjalankan operasional bisnis secara transparan, akuntabel, dan etis. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yang mencakup penyusunan kebijakan anti-korupsi secara komprehensif dan penerapan mekanisme pengawasan internal yang ketat. Salah satu inisiatif yang telah banyak dilakukan adalah penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), yang memungkinkan pemangku kepentingan, seperti baik karyawan, mitra bisnis, maupun pihak eksternal dapat melaporkan tindakan atau aktivitas yang berpotensi melibatkan korupsi maupun pelanggaran kode etik.

Whistleblowing system dirancang untuk memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti secara objektif, rahasia, dan profesional. Dengan adanya mekanisme ini, perusahaan tidak hanya dapat mendeteksi dan mencegah korupsi lebih dini, tetapi juga membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas perusahaan. Sistem ini menjadi elemen penting dalam tata kelola perusahaan karena mendukung terciptanya lingkungan kerja yang jujur, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi yang merusak reputasi maupun keberlanjutan bisnis.

Untuk memastikan efektivitas upaya pencegahan kecurangan, setiap perusahaan perlu mengimplementasikan sistem pengendalian internal secara konsisten di semua lini operasional. Selain itu, harus adanya komunikasi dan pelatihan yang terarah, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh karyawan mengenai berbagai risiko kecurangan, cara mendeteksinya, dan tindakan pencegahan yang dapat diambil. Dengan adanya pendekatan ini, perusahaan dapat membangun kesadaran dan memperkuat kemampuan karyawan dalam menjaga integritas di setiap proses bisnis.

The background of the slide features a teal surface with several wooden blocks. One block in the upper left has a black line-art icon of a hand holding a globe with two green leaves. Another block to its right, held by a hand, shows a green recycling symbol. A third block in the bottom left corner depicts a green landscape with a tree and a sun. A hand is also visible in the bottom right corner.

INDEKS ESG BGK FOUNDATION (ESG LEADER)

Grafik IHSG VS ESG Leader



Catatan:

- IHSG adalah indeks harga saham gabungan.
- ESG Leader adalah Indeks BGK Foundation yang terdiri dari 3 perusahaan terbuka dalam LQ45 yang memiliki nilai total ESG tertinggi.

ESG Leader

EMITEN

SKOR PENGUNGKAPAN LST

ITMG

PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK

96%

PTBA

PT BUKIT ASAM TBK

95%

BBRI

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

94%

Pemetaan LST dan SDGs

122 Perusahaan Emiten

Entitas		ESG	Rata-Rata ESG	Komponen ESG			SDG's
122 Emiten	45%	Environmental	47%	Climate Change	E1 GHG Emissions	39%	
					E2 Emissions Intensity	55%	
				Natural Resources	E3 Energy Usage	40%	
					E4 Energy Intensity	55%	
					E5 Energy Mix	38%	
				E6 Water Usage	44%		
				Pollution and Waste	E7 Environmental Operations	44%	
					E8 Climate Oversight /Board	55%	
				Opportunities and Policy	E9 Climate Oversight / Management	55%	
					E10 Climate Risk Mitigation	57%	
					E11 Forestry CSR	33%	
		Social	43%	Human Capital	S1 CEO Pay Ratio	47%	
					S2 Gender Pay Ratio	44%	
					S3 Employee Turnover	51%	
					S4 Gender Diversity	42%	
					S5 Temporary Worker Ratio	46%	
					S6 Non-Discrimination	44%	
					S7 Injury Rate	38%	
					S8 Global Health and Safety	47%	
					S9 Child and forced labor	47%	
					S10 Human Rights	25%	
				Relations	S11 Social CSR	46%	

Entitas	ESG	Rata-Rata ESG	Komponen ESG	SDG's		
	Governance	45%	Corporate Governance	G1 Board Diversity	48%	
				G2 Board Independence	52%	
				G3 Incentivized Pay	45%	
				G4 Collective Bargaining	35%	
				G5 Supplier Code of Conduct	25%	
			Corporate Behaviour	G6 Ethics & Anti Corruption	40%	
				G8 ESG Reporting	30%	
				G9 Disclosure Practices	61%	
				G10 External Assurance	68%	
				G11 Tax Transparency	59%	
			Product Responsibility	G7 Data Privacy	30%	
						
						

33 Perusahaan Emiten LQ45

Entitas	ESG	Rata-Rata ESG	Komponen ESG			SDG's
33 Emiten LQ45	57%	Environmental	Climate Change	E1 GHG Emissions	55%	
				E2 Emissions Intensity	65%	
			Natural Resources	E3 Energy Usage	49%	
				E4 Energy Intensity	71%	
				E5 Energy Mix	53%	
				E6 Water Usage	58%	
			Pollution and Waste	E7 Environmental Operations	57%	
				E8 Climate Oversight /Board	69%	
			Opportunities and Policy	E9 Climate Oversight / Management	69%	
				E10 Climate Risk Mitigation	71%	
				E11 Forestry CSR	46%	
		Social	Human Capital	S1 CEO Pay Ratio	55%	
				S2 Gender Pay Ratio	59%	
				S3 Employee Turnover	65%	
				S4 Gender Diversity	55%	
				S5 Temporary Worker Ratio	61%	
				S6 Non-Discrimination	53%	
				S7 Injury Rate	49%	
				S8 Global Health and Safety	59%	
				S9 Child and forced labor	58%	
				S10 Human Rights	34%	
			Relations	S11 Social CSR	62%	

Entitas	ESG	Rata-Rata ESG	Komponen ESG	SDG's
	Governance	56%	Corporate Governance G1 Board Diversity 63% G2 Board Independence 65% G3 Incentivized Pay 55% G4 Collective Bargaining 44% G5 Supplier Code of Conduct 34% Corporate Behaviour G6 Ethics & Anti Corruption 44% G8 ESG Reporting 45% G9 Disclosure Practices 73% G10 External Assurance 79% G11 Tax Transparency 76% Product Responsibility G7 Data Privacy 38%	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE 10 REDUCED INEQUALITIES 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS



REKOMENDASI

Rekomendasi untuk Emiten



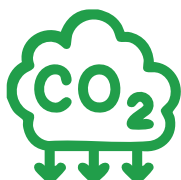
Keterlibatan Dewan Pimpinan

Dewan pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk memuat isu-isu LST dalam strategi bisnis perusahaan. Beberapa pihak (seperti para investor) mengharapkan dewan pimpinan untuk terlibat dan mengerti secara mendalam segala risiko, kendala dan peluang yang berhubungan dengan LST, dan merencanakan sistem pengendalian atau mitigasi risiko yang sesuai. Perusahaan dapat menunjukkan keterlibatan dewan pimpinan dalam isu LST melalui pendirian Badan Tata Kelola Tertinggi atau Direktur LST & Sustainability pada struktur organisasi perusahaan.



Penyusunan Sustainability Blueprint

Sustainability Blueprint merupakan kerangka bagi perusahaan dalam menjalankan inisiatif dan target LST selanjutnya, yang terdiri dari strategi, kebijakan, dan *roadmap* keberlanjutan. Dengan adanya kerangka ini, perusahaan telah menentukan sejak awal arah LST kedepan baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dari sini akan terlihat target-target yang ingin dicapai perusahaan beserta strategi dalam mencapai target tersebut. Kerangka ini mendukung kinerja yang lebih terstruktur dan tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi LST perusahaan.



Pengungkapan terkait Emisi Gas Rumah Kaca

Sebagai bentuk kontribusi terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam pencapaian *Nationally Determined Contribution* yaitu penurunan emisi nasional sebesar 29% pada 2030 yang diungkapkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2016 terkait Pengesahan Perjanjian Paris. Perusahaan perlu memperhatikan isu ini dengan melakukan pengungkapan perhitungan emisi yang dihasilkan dari operasional perusahaan dalam laporan keberlanjutan. Perhitungan emisi tersebut juga perlu memperhatikan lingkup emisi yaitu scope 1, 2, dan 3.



Penggunaan Standar Pelaporan Laporan Keberlanjutan

Selain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017, Surat Edaran OJK nomor 16/SEOJK.04/2021, dan mengadopsi standar pelaporan laporan keberlanjutan seperti *Global Reporting Initiative (GRI) Standard*, perusahaan juga perlu mengacu pada kerangka *Carbon Disclosure Project (CDP)*, *Sustainability Accounting Standard Board (SASB)*, *Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)*, dan *International Sustainability Standards Board IFRS S1 S2*.



Proses Assurance Melalui Pihak Ketiga Independen

Proses *assurance* sebaiknya dilakukan dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan periode selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengungkapan informasi LST yang telah dilakukan perusahaan secara terukur, akurat, kredibel, dan objektif. *Assurance report* akan menambah kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan. Adapun standar internasional yang digunakan dalam proses *assurance* seperti AA1000 dan ISAE3000.



"Patuhi, Jika Tidak Jelaskan Alasan"

Artinya perusahaan dapat memilih untuk mematuhi (dan mengungkapkan faktor LST yang relevan untuk ketentuan tersebut) atau menjelaskan mengenai alasan informasi tersebut tidak diungkapkan. Kami menemukan beberapa perusahaan yang tidak menjelaskan alasan pendukung dari keputusan untuk tidak mengungkapkan topik LST tersebut. Kami juga menemukan bahwa sebenarnya beberapa ketentuan dari faktor LST telah banyak dipraktikkan oleh perusahaan dalam operasi bisnis, namun tidak diungkapkan di dalam laporan keberlanjutan sehingga berpengaruh terhadap nilai pengungkapan LST mereka.



Membuat Strategi untuk Mengurangi Jejak Ekologis

Salah satu cara untuk mengurangi jejak ekologis suatu organisasi adalah dengan menerapkan langkah-langkah efisiensi energi. Hal ini dapat mencakup berbagai cara, mulai dari penggunaan bahan daur ulang hingga peningkatan ke peralatan yang lebih efisien. Dengan mengurangi jumlah energi yang digunakan, organisasi tidak hanya dapat menghemat uang namun juga membantu mengurangi emisi. Selain itu, mendorong praktik berkelanjutan di kalangan karyawan adalah langkah penting lainnya, seperti melalui pelatihan mengenai topik daur ulang, konservasi energi, atau penerapan kebijakan yang mendorong perilaku berkelanjutan. Dengan mempromosikan keberlanjutan di tempat kerja, organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan.



Melakukan Audit terhadap Penggunaan Energi

Salah satu cara dalam mengurangi dampak lingkungan adalah dengan melakukan audit terhadap penggunaan energi dalam organisasi. Proses ini melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana energi digunakan dan identifikasi peluang untuk perbaikan. Misalnya, memberikan rekomendasi peralihan ke penerangan hemat energi atau memasang panel surya. Implementasi atas rekomendasi tersebut tidak hanya membantu perusahaan menghemat biaya energi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan jejak karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan.



Rekomendasi untuk Regulator Pasar Modal

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk regulator Pasar Modal di Indonesia dalam menjalankan peraturan berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*):

1. Peningkatan Literasi dan Kesadaran ESG: Regulator dapat mengadakan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku pasar modal tentang pentingnya ESG. Hal ini dapat mencakup seminar, pelatihan, dan publikasi panduan.
2. Penerapan Standar dan Taksonomi ESG: Mengembangkan taksonomi hijau yang jelas dan terstandar untuk membantu pelaku pasar memahami kategori investasi berkelanjutan. OJK telah mulai menyusun taksonomi berkelanjutan Indonesia yang dapat menjadi acuan.
3. Insentif untuk Investasi Berkelanjutan: Memberikan insentif kepada perusahaan yang menerapkan prinsip ESG, seperti pengurangan biaya administrasi atau akses ke pendanaan dengan bunga rendah.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan kepatuhan terhadap peraturan ESG melalui pengawasan yang ketat dan sanksi bagi pelanggaran. Peraturan seperti POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan efek berlandaskan keberlanjutan dapat menjadi dasar.
5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Melibatkan berbagai pihak, termasuk perusahaan, investor, dan masyarakat, untuk mendukung penerapan ESG secara menyeluruh.
6. Transparansi dan Pelaporan: Mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keberlanjutan yang mencakup aspek ESG, seperti yang diatur dalam Peraturan OJK No. 51 Tahun 2017.
7. OJK dan Bursa Efek Indonesia perlu mewajibkan emiten untuk memberikan pelatihan terkait LST bagi Direksi minimal satu kali.

8. OJK dan Bursa Efek Indonesia segera menyusun *roadmap* dalam mewajibkan emiten mengungkapkan topik *board diversity* dan *climate change* pada laporan keberlanjutan. Implementasi pengungkapan topik *board diversity* dapat dilakukan oleh seluruh sektor emiten. Terkait pengungkapan *climate change*, emiten perlu mengadopsi rekomendasi dari *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) di mana didalamnya terdapat beberapa komponen seperti strategi, manajemen risiko, tata kelola, serta metrik dan target perubahan iklim. Implementasi pengungkapan ini diwajibkan secara khusus untuk emiten sektor keuangan, pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, hasil hutan, barang konsumen primer, barang konsumen non primer, barang baku, kesehatan, perindustrian, kesehatan, manufaktur, teknologi, pertambangan, energi, transportasi, logistik, properti, infrastruktur, dan bangunan.
9. Ikatan Akuntan Indonesia segera menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait emisi gas rumah kaca supaya Nilai Ekonomi Karbon dapat diterapkan secara akuntabel dan kredibel di perusahaan.
10. Kode Etik Lembaga *rating* menurut organisasi pasar modal dunia, diantaranya adalah: Pertama, Transparansi Lembaga *rating* LST dan persepsi pasar terhadap Lembaga *rating* LST yang harus mendukung transparansi Lembaga *rating* LST tersebut; Kedua, Independensi dan penghindaran benturan kepentingan dari Lembaga *rating* LST dengan klien yang dinilai; dan Ketiga, Kompetisi dalam pasar *rating* LST yang menjamin independensi Lembaga *rating* LST itu sendiri.
11. Regulator harus memberikan daftar Lembaga *rating* kepada publik yang informasinya dapat diakses oleh publik secara gratis. Hal ini penting bagi investor retail yang tidak memiliki sumber daya untuk melakukan analisis *rating* LST secara independen.
12. Regulator wajib membuat peraturan yang mengatur insentif dan hukuman bagi perusahaan yang melakukan *green washing* termasuk Bursa Efek.
13. Regulator wajib memberikan arahan dan insentif bagi perusahaan agar tingkat keterbukaan ESG nya mencapai minimal *score* 70% termasuk Bursa Efek.
14. Semua perusahaan dengan lebih dari 500 karyawan harus mengungkapkan laporan keuangan tahunan mereka dengan mewajibkan perusahaan publik untuk menyediakan pengungkapan ESG serta informasi neraca dan laporan laba rugi dalam laporan tahunan mereka yang harus menjadi undang-undang pada tahun 2025. Petunjuk ini dirancang untuk membantu investor memantau dampak lingkungan dari investasi mereka secara lebih dekat dengan memungkinkan mereka mengakses data yang sebanding di seluruh perusahaan.

Adapun rekomendasi untuk regulator dalam mendukung perusahaan publik (*listed companies*) di Indonesia dalam menjalankan peraturan berbasis ESG (*Environmental, Social, and Governance*):

1. Peningkatan Transparansi dan Pelaporan

Mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang mencakup strategi, kinerja, dan dampak ESG mereka. Hal ini telah diatur dalam [POJK No. 51/2017] dan dapat diperkuat dengan panduan yang lebih rinci.

2. Penyelarasan dengan Standar Internasional

Mendorong perusahaan untuk mengadopsi standar internasional seperti *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) atau *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk meningkatkan kredibilitas laporan ESG mereka.

3. Insentif untuk Kepatuhan ESG

Memberikan insentif seperti pengurangan pajak atau akses ke pendanaan hijau bagi perusahaan yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap prinsip ESG.

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan ESG dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan, seperti yang diatur dalam POJK dan surat edaran terkait.

5. Edukasi dan Kesadaran

Mengadakan program pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman perusahaan tentang pentingnya ESG, serta manfaat jangka panjangnya bagi keberlanjutan bisnis.

6. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Melibatkan berbagai pihak, termasuk investor, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penerapan ESG.

Langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan pasar modal yang lebih berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi yang selaras dengan prinsip ESG.

A photograph of a wind turbine in a green field with mountains in the background. The image is overlaid with a green semi-transparent rectangle. The word "PENUTUP" is written in white capital letters on the green rectangle. There is also a solid green rounded rectangle in the top left corner of the page.

PENUTUP

Secara rata-rata, terjadi perbaikan tingkat keterbukaan total ESG pada tahun 2023 sebesar 46,60% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 37,25%, atau mengalami peningkatan sebesar 9,4%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan dalam mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar ESG yang lebih tinggi, tetapi juga mencerminkan upaya kuat guna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.

Demikian laporan tahunan BGK Foundation terkait analisa praktik pengungkapan LST perusahaan-perusahaan nasional pada periode 2023 disampaikan. Kami berharap, dengan analisa dan rekomendasi ini setiap perusahaan di Indonesia kedepannya dapat terus meningkatkan dan mengimplementasikan pengungkapan LST sekaligus meningkatkan kinerja LST demi terwujudnya Indonesia yang berkelanjutan. Pengungkapan ESG harus secara jelas mencerminkan tindakan (atau kelambanan) perusahaan dalam beradaptasi dengan perekonomian *net-zero*. Selain itu, pengungkapan ini juga mendorong akuntabilitas tim manajemen yang tidak menunjukkan kemajuan dalam isu-isu LST atau yang menimbulkan dampak negatif melalui operasi bisnis mereka.

